

**PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA, DAN
TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN PERIODE 1972-1992**



PERPUSSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. terima	10 - 06 - 96
Asal dari	# Ekonomi
Banyaknya	1 bks
Targa	Hasanudin
No. Inventaris	96.24-06-113

OLEH
ALIMIN ALI
88 01 193

**JURUSAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1995

PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA, DAN
TINGKAT PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERIODE 1972-1992

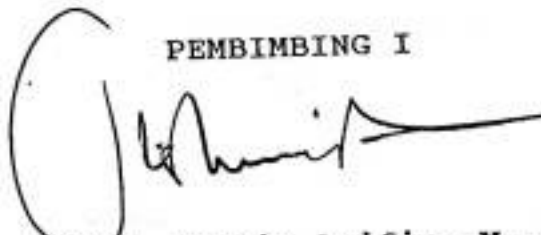
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN ILMU
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA EKONOMI

OLEH :

A L I M I N A L I
88 01 193

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I



(Drs. Taslim Arifin, M. A)

PEMBIMBING II



(Dra. Rahmatia, M. A)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat-Nya jualah sehingga dapat dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Ekonomi Unibersitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Dalam penulisan skripsi ini, berbagai pihak telah ikut membantu. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, terutama kepada :

1. Bapak *Drs. Taslim Arifin, M. A* dan Ibu *Dra. Rahmatia, M. A* sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya yang sangat berharga dalam membimbing penulis sampai selesainya skripsi ini.
2. Bapak *Drs. Kahar Akil, M. A* selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta Bapak *Drs. Hamid Paddu, M. S* selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
3. Bapak Pimpinan Fakultas, Dosen-dosen, serta seluruh tenaga staf Pegawai Administrasi yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan fasilitas dari awal sampai penyelesaian studi.
4. Bapak Kepala Departemen Tenaga Kerja dan Bapak Kepala Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan atas

kesediaannya menerima penulis dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan.

5. Ayahanda *Drs. Muh. Ali Thahir*, Ibunda *St. Aminah Kadir*, Adik-adikku tercinta serta seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan bantuan moril maupun meteril selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat lainnya yang telah memberikan spirit dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya stas keterbatasan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan membangun penulis terima. Dan mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pembaca.

Semoga Yang Maha Kuasa akan tetap memberikan petunjuk, hidayah, dan inayah-Nya serta meridhai segala amal usaha kita untuk langkah selanjutnya, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama dapat tercapai.

Ujung Pandang, Maret 1996

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penulisan	6
1.4. Hipotesa	7
1.5. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KERANGKA TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.2. Pertumbuhan Ekonomi	10
2.3. Kesempatan Kerja	15
2.4. Produktivitas Tenaga Kerja	19
2.5. Produk Domestik Regional Bruto	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	26
3.2. Daerah Penelitian	26
3.3. Jenis dan Sumber Data	27
3.4. Metode Analisis	27
3.5. Pengambilan Keputusan	31
3.6. Batasan Variabel	31

BAB IV PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN TENAGA KERJA DI	
PROPINSI SULAWESI SELATAN	
4.1. Penduduk	33
4.1.1. Jumlah Penduduk	33
4.1.2. Pertumbuhan Penduduk	36
4.1.3. Penyebaran Penduduk	39
4.2. Tenaga Kerja	40
4.2.1. Angkatan Kerja	46
4.2.2. Bukan Angkatan Kerja	48
4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..	50
BAB V ANALISA PEMBAHASAN	
5.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan	52
5.2. Kesempatan Kerja Propinsi Sulawesi Selatan	64
5.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan	74
5.4. Pengaruh Kesempatan Kerja dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992 ..	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
6.1. Kesimpulan	84
6.2. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1. Pembagian Daerah Administrasi Propinsi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1992	34
4.2. Luas Daerah dan Penyebaran Penduduk Menurut Kabupaten dan Kotamadya Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1992	35
4.3. Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Per Kabupaten dan Kotamadya Tahun 1972-1992	37
4.4. Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Usia 15-64 tahun Menurut Jenis Kegiatan	45
4.5. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan	47
4.6. Struktur Penduduk dan Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1972-1992	50
5.1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1983, Periode 1972-1992	54
5.2. Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1983, Periode 1972-1992	55

5.3. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1983, Periode 1972-1992	62
5.4. Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1983, Periode 1972-1992	63
5.5. Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992	65
5.6. Persentase Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992	66
5.7. Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992 .	71
5.8. Persentase Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992	72
5.9. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992	75
5.10 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992	77

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Syarat utama dari pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri. Kekuatan luar seyogyanya merangsang dan membantu ekonomi nasional. Agar pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut dan bersifat kumulatif maka kekuatan ekonomi harus berakar pada perekonomian dalam negeri.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentunya mempunyai tujuan dan sasaran pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun sasaran pembangunan dalam Pelita I hingga Pelita VI, sampai sekarang ini sesuai dengan pola pembangunan jangka panjang diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi sebagai titik berat yang merupakan penggerak utama pembangunan jangka panjang kedua, seiring dengan kualitas sumber daya manusia, maka prioritas pembangunan lima tahun keenam adalah pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan sumber daya manusia, yang berkembang sebagai berikut :

1. Penataan industri nasional yang mengarah pada penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung kemampuan teknologi yang makin meningkat; peningkatan ketangguhan pertanian; pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi; penyempurnaan pola perdagangan; jasa dan sistem distribusi; pemanfaatan secara optimal dan tepat guna faktor produksi dan sumber daya ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri yang menjamin peningkatan keadilan, kemakmuran, dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Pembangunan sumber daya manusia makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu, disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mantap.
(Republik Indonesia, 1993).


Namun demikian masalah pokok yang dihadapi pemerintah dewasa ini, adalah bukan mengenai bagaimana usaha meningkatkan produksi di bidang pertanian, tapi bagaimana mendorong ekonomi secara keseluruhan kebutuhan-kebutuhan konsumen dari masyarakat Indonesia, akan lebih kompleks lagi dari pada itu sehingga yang menjadi salah satu faktor penghambat yang disadari oleh pemerintah adalah faktor perkembangan penduduk yang pesat yang setiap tahun menunjukkan angka-angka pertumbuhan yang besar, sehingga menyulitkan terciptanya lapangan kerja.

Ir. Entang Sastraatmadji dalam bukunya menyatakan bahwa :

"Di negara-negara berkembang pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya menambah kerumitan masalah pembangunan yang dihadapi. Dapatlah dikatakan bahwa masalah penduduk merupakan masalah yang paling sukar diatasi".
(Ir. Entang Sastraatmadji, 1986).

Di dalam usaha-usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur maka secara nasional ditempuh kebijaksanaan pembangunan yang berlandaskan *Trilogi Pembangunan*, yaitu :

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.



Dengan berlandaskan Trilogi Pembangunan tersebut, tujuan khusus yang ingin dicapai dalam Pelita VI ini dan merupakan tahun pertama dari Pembangunan Jangka Panjang Kedua terdiri dari :

1. Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir bathin yang lebih selaras, adil dan merata.
2. Meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya. (Republik Indonesia, 1993)

Tujuan utama dari proses pembangunan yang dilakukan selama ini adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Bila tujaun ini dihubungkan dengan masalah ketenagakerjaan, maka tujuan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dengan suatu usaha untuk membina sumberdaya manusia Indonesia yang berproduktif bersemangat dan penuh inisiatif serta sehat secara jasmani dan rohani. Untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan tersebut. Selain itu tantangan yang timbul juga harus bisa dijawab secara memuaskan. Dari berbagai masalah ketenagakerjaan yang dihadapi dewasa ini salah satu cara yang dapat ditempuh diantaranya yang paling menonjol adalah dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, dan mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, yang dapat mengakibatkan

banyaknya pengangguran. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat tentu saja menuntut tersedianya lapangan kerja, guna mendapatkan pendapatan dalam memenuhi kelanjutan hidupnya.

Salah satu faktor yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk tersebut adalah tenaga kerja atau "Man Power" yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, Angkatan Kerja terdiri dari :

1. Golongan yang bekerja
2. Golongan yang menganggur tidak mencari pekerjaan.

Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah :

1. Golongan yang bersekolah
2. Golongan yang mengurus rumah tangga
3. Golongan lain-lain.

Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh karena itu kelompok ini sering dinamakan *Potensial Labour Force*. (Payaman J. Simanjuntak, 1985).

Drs. Winardi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"Karena penambahan penduduk bukan saja berarti penambahan tenaga kerja melainkan bertambahnya orang-orang yang membutuhkan bagian dari pada pendapatan nasional". (*Drs. Winardi, 1973*).

Perluasan tenaga kerja secara produktif bukan saja menciptakan lapangan kerja yang baru, melainkan juga

menyangkut peningkatan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu masalah sarana pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan sebagai landasan utama.

Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses produksi. Sebagai sarana produksi tenaga kerja lebih penting dari pada sarana produksi yang lain seperti bahan mentah, tanah, air, dan sebagainya. Karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang. (Payaman J. Simanjuntak, 1985).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul "*Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992*".

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaruh kesempatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1972-1992.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melihat berapa besar pengaruh kesempatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1972-1992.

1.4. Hipotesa

Diduga bahwa kesempatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja mempunyai hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 1972-1992.

1.5. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika pembahasan dari penulisan skripsi ini secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : adalah Bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang; Permasalahan; Tujuan Penulisan; Hipotesa; dan sistimatika Pembahasan.

Bab Kedua : adalah Kerangka Teoritik yang membahas tentang Tinjauan Pustaka dan beberapa pengertian pokok dari Pertumbuhan Ekonomi; Kesempatan Kerja; Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja; dan Produk Domestik Regional Bruto.

Bab Ketiga : Metodologi Penelitian yang membahas tentang Metode Penelitian; Jenis dan Sumber Data; Metode Analisis; Pengambilan Keputusan ; dan Batasan Variabel.

Bab Keempat : Perkembangan Penduduk dan Tenaga Kerja di Propinsi Sulawesi Selatan.

Bab Kelima : merupakan Bab Pembahasan mengenai Pertumbuhan Ekonomi; Kesempatan Kerja;

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja; serta pengaruh Kesempatan Kerja dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan selama Periode 1972-1992.

Bab Keenam : merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dari sumber daya alam ini ditandai oleh berbagai macam potensi hasil alam Indonesia baik hasil tambang, hutan dan hasil-hasil dari berbagai bidang lainnya. Sedangkan untuk sumber daya manusia diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak nomor lima di dunia.

Jumlah penduduk Indonesia bukan saja menjadi kekayaan yang tak ternilai harganya, sebagai modal untuk pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan ekonomi karena semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang dihasilkan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

Besarnya masalah yang dihadapi oleh pemerintah penyediaan lapangan kerja baru, secara kasar dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Dilain pihak dikatakan bahwa salah satu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bangsa adalah jumlah penduduk yang cukup besar apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang sangat besar dan menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

Pertumbuhan angkatan kerja yang cukup tinggi mempengaruhi pula jumlah angkatan kerja yang memasuki pasar kerja, tetapi karena adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi maka proporsi anak-anak muda berkembang dengan pesat sehingga pada kelompok ini terlihat adanya tingkat pengangguran yang sangat tinggi.

Fungsi tenaga kerja menurut Soeroto, MA ada dua, antara lain :

"Pertama sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, kedua sebagai sarana untuk menimbulkan dan mengembangkan pasar. Kedua fungsi merupakan dua syarat yang sama mutlaknya bagi suksesnya pembangunan". (Soeroto MA, 1986)

Tenaga kerja dalam masyarakat adalah faktor yang potensial untuk pembangunan Indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas maupun pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu konsepsi atau strategi pembangunan, mulai populer di dunia ketiga sejak tahun 50-an pada saat dimana derap pembangunan pembangunan bergemuruh dengan kerasnya, sebagai reaksi terhadap keterbelakangan. Konsepsi ini mulai diambil

sebagai panutan dengan melihat pengalaman berat yang telah berhasil dalam pertumbuhan ekonomi, setelah melakukan industrialisasi. Berdasarkan pengalaman tersebut, negara-negara di dunia ketiga berbondong-bondong menempuh strategi industrialisasi.

Demikian populernya pertumbuhan ekonomi tersebut sehingga sering diidentikkan dengan pembangunan. Apakah arti sebenarnya dari pertumbuhan ekonomi ini ?

Budiono memberikan pengertian tentang pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

"Pertumbuhan adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi suatu saat". (DR. *Budiono*, 1982).

Terlihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Jelas disini ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Output perkapita adalah total dibagi jumlah penduduk.

Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output perkapita dalam satu dua tahun yang kemudian diikuti dengan penurunan output perkapita tidak dapat disebut pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila

dalam jangka waktu cukup lama (10, 20, atau 30 tahun bahkan lebih lama lagi) mengalami kenaikan output perkapita.

Menurut *Adam Smith* peningkatan output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah orang yang sama melalui sistim pembagian kerja, bersumber dari tiga hal : pertama karena spesialisasi meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidang spesialisasi pekerjaannya; kedua karena sistim pembagian kerja mengurangi waktu yang hilang sewaktu pekerja beralih dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain; ketiga karena ditemukannya mesin-mesin yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan dan memungkinkan peningkatan produktivitas pekerja. (DR. Budiono, 1982).

Menurut *Rostow* pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi suatu masyarakat moderen merupakan suatu proses yang berdimensi banyak. Pembangunan ekonomi bukan saja berarti perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara yang mengakibatkan peranan kegiatan industri meningkat. Disamping perubahan seperti itu pembangunan ekonomi berarti pula, menurut *Rostow*, suatu proses yang menyebabkan antara lain : (i) perubahan orientasi ekonomi, politik dan sosial yang pada mulanya mengarah ke dalam suatu daerah menjadi berorientasi ke luar; (ii) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga; (iii) perubahan dalam kegiatan

penanaman modal masyarakat dari melakukan penanaman modal yang tidak produktif, seperti rumah, emas dan sebagainya menjadi penanaman modal yang produktif; (iv) perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat dari ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaannya; dan (v) perubahan dalam pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya dan selanjutnya manusia berpandangan bahwa harus memanipulasi keadaan alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan. (Sadono Sukirno, 1985).

Jadi Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat; yaitu perubahan dalam keadaan politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakatnya, dan struktur kegiatan ekonomi.

Arthur Lewis membangun teori yang sangat sistimatis mengenai "*Pembangunan ekonomi dengan penawaran buruh yang tidak terbatas*". Seperti para ahli ekonomi klasik, dia percaya bahwa di banyak negara terbelakang tersedia buruh dalam jumlah yang tidak terbatas dan dengan upah sekedar cukup untuk hidup (*Subsisten*). Pembangunan ekonomi berlangsung apabila modal terakumulasi sebagai akibat peralihan buruh surplus dari sektor *subsisten* ke sektor *kapitalis*. Sektor kapitalis adalah bagian dari ekonomi yang memakai kapital yang dapat direproduksi dan membayar

kepada si pemilik kapital tersebut. Sektor ini mempekerjakan buruh dengan upah di pertambangan, pabrik, dan perkebunan, guna menghasilkan laba. Sektor subsisten adalah bagian dari ekonomi yang tidak menggunakan modal yang dapat direproduksi. Pada sektor ini, output perkapita lebih rendah dibandingkan pada sektor kapitalis. (M. L. Jhingan, 1988).

DR. J. H. Boeke berpendapat bahwa dalam arti ekonomi masyarakat memiliki tiga ciri yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan tehnik yang mendominasinya. Saling keterkaitan antara ketiga ciri tersebut disebut sistim sosial atau gaya sosial. Suatu masyarakat disebut homogen apabila di dalamnya hanya terdapat satu sistim sosial yang berlaku. Tetapi suatu masyarakat mungkin memiliki sekaligus dua sistim atau lebih. Masyarakat seperti itu disebut masyarakat dualistik atau majemuk. (Jhingan, 1988).

Ada dua ciri absolut sektor timur perekonomian dualistik yang membedakannya dari masyarakat barat. Kebutuhan masyarakat timur adalah terbatas. Orang merasa dapat puas jika kebutuhan-kebutuhan mendesak mereka terpenuhi. Ciri kedua adalah bahwa industri pribumi hampir-hampir tidak mempunyai organisasi, tanpa modal, secara tehnik tidak berdaya dan tidak mengenal pasar.

2.3. Kesempatan Kerja

Akhir-akhir ini diberikan perhatian yang cukup besar pada perluasan kesempatan kerja "informal" yang berlaku sebagai spons bagi surplus tenaga kerja dari bidang pertanian. (Zainab Bakir dan Chris Manning, 1984).

Mengingat cepatnya pertumbuhan angkatan kerja pada tahun 70-an bersama dengan amat besarnya jumlah lulusan sekolah, orang tidak bisa lain kecuali terkesan oleh kemampuan sistim perekonomian Indonesia untuk menyediakan pekerjaan bagi sejumlah besar calon angkatan kerja per tahun. Tingkat pengangguran yang rendah (dengan mengesampingkan masalah defenisi) di wilayah perkotaan pun dimana pertumbuhan tenaga kerja begitu tinggi, tetap merupakan tanda tanya. Tidak disangsikan lagi kemampuan sektor informal untuk menyerap, bahkan menarik, sejumlah besar pencari kerja; hal ini barangkali dapat membantu menenangkan gejala pengangguran yang rendah tersebut.

Pengertian kesempatan kerja selanjutnya akan dikemukakan oleh Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih yang menyatakan bahwa :

"Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan kerja dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang sudah diduduki dan masih lowong, dari masih lowongan tersebut, (yang mengandung arti adanya kesempatan) timbul kemudian kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara riil diperlukan untuk perusahaan atau lembaga penerimaan kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu, melalui advertensi, dan lain-lain kemudian

dinamakan lowongan". (Yudo Swasono dan Endang Sulistyaningsih, 1983).

Kedua pengertian tersebut di atas pada dasarnya mempunyai kesamaan yang masing-masing menekankan bahwa kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang sudah diduduki dan masih lowong. Akan tetapi dalam penulisan ini, istilah kesempatan kerja diartikan sebagai lapangan kerja yang sudah diduduki atau penggunaan tenaga kerja.

Sebagaimana halnya negara-negara berkembang lainnya sebagian besar angkatan kerja Indonesia yang berada di luar kelompok sektor primer terserap di sektor sekunder.

Tiap kegiatan mempunyai daya serap yang berbeda akan tenaga kerja, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Daya serap tersebut berbeda secara sektoral dan menurut penggunaan teknologi. Sektor yang dibangun dengan cara padat karya pada dasarnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang relatif besar dan tidak terlalu terikat kepada persyaratan keterampilan yang tinggi. Sebaliknya sektor atau sub sektor yang dibangun dengan cara padat modal menimbulkan kesempatan kerja yang kecil, akan tetapi dengan keterampilan tenaga kerja yang cukup.

Di dalam perkembangan kesempatan kerja selama tahun 1971-1980 menurut sektor, kelompok sektor M terutama menunjukkan laju pertumbuhan (persen per tahun) tertinggi baik untuk desa maupun kota. Meluasnya kesempatan kerja di sektor industri dan sektor konstruksi



menyebabkan pesatnya laju pertumbuhan kesempatan kerja sektor tersier di daerah perkotaan. (Sadono Sukirno, 1985).

Lewis tidak menyangkal bahwa beberap negara berkembang, misanya di negara-negara Afrika dan Amerika Latin, terdapat masalah kekurangan tenaga kerja. Sedangkan di negara-negara lain misalnya India, Jamaika, dan negara kita sendiri, terdapat penawaran tenaga kerja yang berlebihan. Di negara-negara seperti itu jumlah penduduk adalah tidak seimbang jika dibandingkan dengan modal dan kekayaan alam yang tersedia, dan sebagai akibat dari keadaan ini terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktivitas sebagian tenaga kerjanya sangat kecil, nol atau negatif. (Sadono Sukirno, 1985).

Pola perkembangan kesempatan tenaga kerja masih tetap mengikuti jalur tradisional. Peningkatan lapangan kerja ini tidak diimbangi secara proporsional dengan peningkatan nilai tambah yang dapat dihasilkan sektor tersebut. Dengan mempergunakan teknologi padat modal, tingkat produktivitas telah mampu berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi padat karya. (Priyono Tjiptoherijanto, 1982).

Memperhatikan distribusi angkatan kerja di negara-negara maju saat ini terlihat bahwa proporsi terbesar berada pada sektor tersier. Hanya sebagian kecil saja di sektor primer (pertanian). Proses perkembangan ekonomi

negara maju diikuti oleh suatu perubahan struktur kesempatan kerja sektor industri. Dinamika struktur kesempatan kerja oleh *Fisher (1933)* dan *Clark (1957)* menyatakan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi suatu masyarakat jumlah angkatan kerja sektor primer cenderung lebih menurun dibandingkan dengan sektor sekunder yang selanjutnya sektor sekunder akan lebih menurun dibandingkan sektor tersier. (Zainab Bakir dan Chris Manning, 1984).

Kesempatan kerja terbuka pada saat industri mulai berkembang, namun pada waktu yang sama teknologi penghemat tenaga kerja diketemukan sehingga mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Kombinasi kedua gejala tersebut memungkinkan negara-negara barat melakukan transfer sumber daya manusia dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan secara tertib dan efektif. Berdasarkan pengalaman ini, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa pembangunan ekonomi di dunia ketiga harus dilakukan dengan mempercepat pertumbuhan industri. (Micahel P. Todaro, 1989).

Pertumbuhan kota yang cepat cenderung menciptakan jenis pekerjaan dari sektor non pertanian dan terutama dari sektor primer. Penyerapan tenaga kerja pedesaan di Indonesia masih didominasi oleh sektor primer (pertanian). Sebanyak 66,2% seluruh pekerja di pedesaan bekerja dalam sektor tersebut, kemudian diikuti oleh sektor tersier

(23,1%). Berlawanan dengan keadaan di perkotaan, tenaga kerja tersier di Pulau Jawa menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan luar Pulau Jawa; hasil yang sama juga nampak bagi sektor sekunder. Hal ini mungkin disebabkan (selain perkembangan kota kecil di Pulau Jawa yang tidak termasuk dalam kategori daerah kota) juga oleh perkembangan daerah pinggiran kota yang terdaftar sebagai daerah pedesaan; diduga dalam wilayah tersebut banyak muncul usaha-usaha perdagangan, angkutan, dan jasa-jasa lainnya. (Zainab Bakir dan Chris Manning, 1984).

Di Indonesia pada tahun 1980 tercatat kurang lebih 55,8 juta penduduk terserap dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dengan jumlah ini berarti telah terjadi pertambahan lebih dari 15,5 juta lapangan pekerjaan sejak tahun 1971, atau pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 3,7% rata-rata per tahun. Dari jumlah tersebut sekitar 81,6% kesempatan kerja berada di daerah pedesaan. Sebagian besar (66,2%) dari penduduk yang bekerja di pedesaan ini diserap dalam sektor primer kemudian sektor tersier sebesar 23,1% dan hanya 10,8% di sektor sekunder. (Zainab Bakir dan Chris Manning, 1984).

2.4. Produktivitas Tenaga Kerja

Masalah sumber daya manusia suatu negara merupakan unsur utama yang harus diperhatikan pengembangannya. Kunci keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan

sangat bergantung kepada kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki.

Begitu pula produktivitas sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dalam aktivitasnya memperoleh suatu input yang ada, sehingga menghasilkan output secara optimal.

Yang dimaksud dengan produktivitas adalah :

"Perbandingan antara jumlah yang dihasilkan dengan jumlah tiap sumber yang dipakai selama produksi berlangsung". (International Labour Office, 1975).

Pengertian Produktivitas mengandung arti filosofis defenisi kerja dan teknis operasional. Secara filosofis produktivitas mengandung pandangan hidup dan mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan ini harus lebih baik dari pada kemarin, dan mutu kehidupan esok harus lebih baik dari pada hari ini. Pandangan hidup dan sikap mental demikian akan mendorong manusia untuk tidak cepat puas, akan tetapi mengembangkan dirinya meningkatkan kemampuan kerja. (International Labour Office, 1975).

Untuk defenisi kerja, produktivitas merupakan perbandingan suatu hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang dipergunakan per satuan waktu. Defenisi ini mengandung cara atau metode pengukuran, walau secara teori dapat dilakukan, akan tetapi dalam prakteknya sukar dilaksanakan, terutama

karena sumber daya masukan yang digunakan umumnya terdiri dari banyak macam dan dalam proporsi yang berbeda-beda.

Pencapaian produktivitas tenaga kerja yang tinggi suatu negara merupakan suatu tujuan yang sangat diharapkan. Mengingat produktivitas merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menjalankan misionya. Sebagian orang menilai produktivitas diartikan sebagai upaya memperbesar hasil usaha yang sama. Sementara itu menurut *R. Saint Paul*, produktivitas adalah ratio antara kebutuhan dan pengorbanan yang dilakukan. Sedangkan menurut *Paul Muli, Cs* dalam bukunya "*Productivity Improvement Hand Book 1981*", produktivitas dapat mengandung dua aspek yaitu, aspek efektivitas dan aspek efisiensi yang satu sama lain terkait bila dilihat dari kualitas maupun kuantitas. (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sept-Okt 1988).

Terlepas dari pengertian tersebut di atas, produktivitas tenaga kerja adalah upaya efisiensi usaha dalam memproses sumber daya yang digunakan, upaya efisiensi kerja yang optimal memang tidak mudah untuk dicapai, sudah barang tentu banyak faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut.

2.5. Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah growth rate dari pada GDP (Gross Domestic Product) riil.

Budiono dalam bukunya "*Teori Pertumbuhan Ekonomi*", menyatakan bahwa :

"Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Disini jelas ada dua sisi yang diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita tidak bisa tidak, harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap haruslah bisa menjelaskan apa terjadi pada jumlah penduduknya". (Budiono, 1982).

Untuk menghitung nilai produksi yang diciptakan oleh suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan tiga cara perhitungan. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Cara Produksi*, yaitu keseluruhan produksi yang diperoleh dari penjumlahan nilai-nilai produksi yang diciptakan oleh berbagai industri yang ada dalam perekonomian.
2. *Cara Pendapatan*, yaitu nilai keseluruhan produksi dalam suatu perekonomian diperoleh dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pendapatan dari tenaga kerja, modal harta-harta tetap (tanah dan bangunan) yang disewakan dan keahlian keusahawan.
3. *Cara Pengeluaran*, yaitu nilai hasil produksi yang diperoleh adalah hasil penjumlahan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan rumah tangga pengusaha-pengusaha, pemerintah dan penduduk luar negeri atas

barang dan jasa yang diproduksi di negara itu. (Sadono Sukirno, 1981).

Untuk menghitung pendapatan nasional produksi seluruh perekonomian negara dipecah ke dalam sebelas sektor yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian
3. Sektor Industri
4. Sektor Listrik dan Gas
5. Sektor Angkutan dan Telekomunikasi
6. Sektor Bangunan
7. Sektor Bank dan Lembaga Keuangan
8. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
9. Sektor Sewa Rumah
10. Sektor Pemerintahan
11. Sektor Jasa-jasa. (Sadono Sukirno, 1981)

Perhitungan pendapatan regional di Propinsi Sulawesi Selatan digunakan beberapa konsep dan defenisi, yaitu sebagai berikut :

1. *Produk Domestik Regional Bruto* adalah seluruh produk dari barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik regional tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksi berasal atau dimiliki oleh penduduk domestik regional tersebut atau tidak.
2. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Satu Tahun* adalah jumlah nilai produk atau

- pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap satu tahun.
3. *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar* atau merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha atau sektor yang meliputi balas jasa faktor produksi (upah gaji serta surplus usaha), penyusutan dan pajak tak langsung netto.
 4. *Produk Regional Bruto* adalah Produk Domestik Regional Bruto ditambah dengan pendapatan netto dari luar daerah.
 5. *Produk Regional Netto* adalah Produk Domestik Regional Bruto dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal.
 6. *Produk Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi* adalah Produk Regional Netto Atas Dasar Harga Pasar dikurangi Pajak Tak Langsung Netto. Produk Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi merupakan Pendapatan Regional.
 7. *Pendapatan Per Kapita* adalah Produk Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor Produksi dibagi dengan jumlah penduduk per tengah tahun.
 8. *Pajak Tak langsung Netto* adalah pajak tidak langsung dikurangi dengan subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen. (Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, 1979-1982).

Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan terciptanya perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor perekonomian. Dengan meluasnya kesempatan kerja merupakan indikasi bahwa bidang-bidang pembangunan ekonomi telah mengalami kemajuan, dalam artian meningkatkan hasil produksi. Dan pada akhirnya akan menyebabkan semakin lajunya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan produktivitas yang merupakan perbandingan antara total output produksi dengan input tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat produktivitas menyebabkan pula semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, demikian pula sebaliknya produktivitas yang rendah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

Syahrudin Seman dalam tulisannya yang berjudul "Produk Domestik Regional Bruto dan Elastisitas Kesempatan Kerja Daerah Nusa Tenggara Barat 1977-1980" mencoba menelaah aspek-aspek ketenagakerjaan terutama kesempatan kerja akibat dari pertumbuhan ekonomi di daerah Nusa Tenggara Barat. (Lembaga Demografi FE-UI 1983).

Penulis lain yaitu Rini Syamsuddin dalam tulisannya "Tinjauan Kesempatan Kerja Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi di Propopinsi Sulawesi Selatan 1983-1990", ia membandingkan pertumbuhan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang dibutuhkan, maka digunakan metode Library Reseach atau penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis yaitu dari buku-buku, majalah, dan sebagainya.

3.2. Daerah Penelitian

Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan terletak pada $0^{\circ} 12'$ Lintang Utara dan $8'$ Lintang Selatan, dan antara $116^{\circ} 048'$ - $112^{\circ} 36'$ Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan Teluk Bone
- Sebelah Utara : Propinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : dengan Selat Makassar

Luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan adalah 69.508 km^2 , secara administrasi pemerintah terbagi menjadi 21 Kabupaten Daerah Tingkat II, dan 2 Kotamadya.

Propinsi Sulawesi Selatan didiami oleh beberapa suku bangsa yaitu Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja. Suku Makassar meliputi Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kotamadya Ujung Pandang. Suku Bugis meliputi Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Kotamadya Pare-pare, Wajo, Soppeng, Sidrap, dan Sinjai. Sedangkan

Luwu dan Enrekang, didiami suku Maspul dan suku Luwu berada di bawah bayang-bayang suku Bugis. Suku Mandar meliputi Kabupaten Majene, Polmas, dan Mamuju. Suku Toraja meliputi Kabupaten Tana Toraja sendiri.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

1. Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Kantor Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Kantor Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan.

3.4. Metode Analisis

Untuk membuktikan hipotesa yang telah dikemukakan sebelumnya, maka data yang terkumpul dapat dikelompokkan dan diolah kemudian dianalisa secara kuantitatif.

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan antara output dengan input tenaga kerja, dalam bentuk rumus dapat ditulis sebagai berikut :

$$P_i = \frac{\text{Output}}{\text{Input Tenaga Kerja}} \quad (1)$$

dimana :

P_i = Tingkat produktivitas tenaga kerja per sektor.

Output = Hasil produksi dari barang dan jasa yang dinilai dalam bentuk uang.

Input TK = Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam menghasilkan output tersebut. (International Labour Office, 1975).

Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yaitu dengan menggunakan model sebagai berikut :

$$Y_t = Y_0 (1 + r)^n \quad (2)$$

dimana :

Y_t = Jumlah PDRB pada tahun akhir

Y_0 = Jumlah PDRB pada tahun awal

r = Angka pertumbuhan

n = Waktu antara Y_0 dengan Y_t .

Pengaruh kesempatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum digambarkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk umum dapat ditulis :

$$Y = f (TK , PT)$$

$$Y = A + B TK + C PT + E \quad (3)$$

2. Kedua variabel bebas masing-masing terbagi menjadi tiga sehingga persamaannya menjadi :

$$Y = f (TK_1, TK_2, TK_3, PT_1, PT_2, PT_3)$$

$$Y = A + BTK_1 + CTK_2 + DTK_3 + EPT_1 + FPT_2 + GPT_3 + E(4)$$

3. Untuk mencari elastisitasnya :

$$\ln Y = f(\ln TK_1, \ln TK_2, \ln TK_3, \ln PT_1, \ln PT_2, \ln PT_3)$$

$$\ln Y = A + B \ln TK_1 + C \ln TK_2 + D \ln TK_3 + \ln E PT_1 + \ln F PT_2 + G \ln PT_3 + E \quad (5)$$

dimana :

Y = Angka pertumbuhan PDRB

A = Konstanta

TK_1 = Pertumbuhan Kesempatan Kerja Sektor Primer

TK_2 = Pertumbuhan Kesempatan Kerja Sektor Sekunder

TK_3 = Pertumbuhan Kesempatan Kerja Sektor Tersier

PT_1 = Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor
Primer

PT_2 = Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor
Sekunder

PT_3 = Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sektor
Tersier

$B-G$ = Koefisien Regresi

E = Kesalahan Baku

Alasan pemilihan pendekatan regresi untuk menghitung pengaruh kesempatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu karena data yang akan dianalisa terdiri dari beberapa variabel yang dapat dibuktikan dengan beberapa pengujian statistik.

Untuk menganalisa bagaimana dan berapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan rumusan-rumusan di atas, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :



1. Dari sembilan lapangan usaha yang ada disederhanakan menjadi tiga sektor yaitu Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tertier.
2. Menghitung pertumbuhan kesempatan kerja per sektor dengan menggunakan persamaan (2) yang selanjutnya dianggap sebagai variabel dependent atau variabel bebas.
3. Menghitung tingkat produktivitas tenaga kerja dengan menggunakan persamaan (1) yaitu dengan membandingkan jumlah PDRB per sektor dengan jumlah tenaga kerja per sektor yang selanjutnya dianggap sebagai variabel dependent atau variabel bebas.
4. Mencari angka pertumbuhan ekonomi yaitu dengan menghitung kenaikan jumlah PDRB secara keseluruhan dari tahun ke tahun dengan menggunakan persamaan (2), yang selanjutnya dianggap sebagai variabel independent atau variabel terikat.
5. Setelah data dari hasil perhitungan di atas dikelompokkan maka hasilnya akan tampak seperti pada persamaan (4), sedangkan untuk mencari elastisitasnya maka dapat dilihat pada persamaan (5).
6. Data yang sudah dikelompokkan tadi kemudian dihitung dengan menggunakan persamaan (5) diolah dengan peralatan microstar dan menghasilkan sebuah persamaan regresi yang dapat menjelaskan berapa besar hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5. Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan sebagai hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independent terhadap variabel dependent, maka akan digunakan uji statistik sebagai berikut :

- Uji statistik t, untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel independent terhadap variabel dependent secara individual. Variabel-variabel tersebut dikatakan signifikan jika nilai t-hitung sama atau lebih besar dari t-tabel.
- Uji statistik F, untuk mengetahui tingkat signifikansi antara variabel independent secara keseluruhan terhadap variabel dependent. Variabel-variabel tersebut dikatakan signifikan jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel.
- Uji statistik R^2 digunakan untuk mengetahui derajat keeratan antara variabel independent terhadap variabel dependent.
- Uji statistik Durbin Watson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi yang terjadi dari data yang digunakan.

3.6. Batasan Variabel

- a. Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan PDRB dari tahun ke tahun.

- b. Kesempatan Kerja diartikan sebagai lapangan kerja yang sudah diduduki atau penggunaan tenaga kerja.
- c. Tingkat Produktivitas merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan (PDRB) dengan input tenaga kerja yang digunakan.
- d. Lapangan usaha yang terdiri dari sembilan sektor disederhanakan menjadi tiga sektor ekonomi yaitu :
- Sektor Primer (Agriculture) : Pertanian.
 - Sektor Sekunder (Manufacture): Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan Air; Bangunan dan Konstruksi; serta Angkutan dan Komunikasi.
 - Sektor Tersier (Service) : Perdagangan, Restoran, dan Hotel; Lembaga Keuangan dan Bank; serta Jasa-jasa dan Pemerintahan.

BAB IV
PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN TENAGA KERJA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

4.1. Penduduk

4.1.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar mencerminkan dua hal. Pertama, jumlah penduduk yang besar menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kesempatan kerja. Kedua, jumlah penduduk yang besar mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat.

Pertambahan penduduk yang terus-menerus meningkat di Sulawesi Selatan disebabkan oleh jumlah kelahiran yang lebih besar dari pada jumlah kematian.

Penyebaran dan kepadatannya yang tidak merata, mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja.

Penyebaran penduduk yang lebih merata dianggap lebih baik bagi kelancaran pembangunan sebab dapat sekaligus memecahkan dua masalah yaitu kepadatan penduduk dan masalah kekurangan tenaga kerja.

Tabel 4.1 Pembagian Daerah Administrasi
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1992

No	Kabupaten dan Kotamadya	Ibukota	Kecamatan	Desa dan Kelurahan
01	Selayar	Benteng	5	29
02	Bulukumba	Bulukumba	7	89
03	Bantaeng	Bantaeng	3	28
04	Jeneponto	Bonto Sunggu	5	69
05	Takalar	Pattalassang	6	57
06	Gowa	Sungguminasa	9	111
07	Sinjai	Sinjai	7	63
08	Maros	Maros	7	75
09	Pangkep	Pangkajene Kep.	6	86
10	Barru	Barru	5	34
11	Bone	Watampone	23	288
12	Soppeng	Watansoppeng	6	59
13	Wajo	Sengkang	10	103
14	Sidrap	Pangkajene Sid.	7	47
15	Pinrang	Pinrang	8	70
16	Enrekang	Enrekang	5	42
17	Luwu	Palopo	21	290
18	Tana Toraja	Makale	9	91
19	Polmas	Polewali	9	110
20	Majene	Majene	4	29
21	Mamuju	Mamuju	6	42
22	Ujung Pandang	Ujung Pandang	11	62
23	Pare-pare	Pare-pare	3	12
J u m l a h			185	1886

Sumber : Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.1 memperlihatkan pembagian daerah administrasi Pripinsi Sulawesi Selatan beserta banyaknya kecamatan, desa dan kelurahan pada tahun 1992.

Dari tabel tersebut tampak bahwa daerah terbanyak kecamatannya adalah Kabupaten Bone yaitu sebanyak 23 kecamatan, disusul Kabupaten Luwu sebanyak 16 kecamatan, Kotamadya Ujung Pandang 11 kecamatan, dan Kabupaten Wajo 10 kecamatan. Selebihnya memilki tidak lebih dari 10 kecamatan, daerah paling sedikit kecamatannya yaitu Kabupaten Bantaeng dan Kotamadya Pare-pare masing-masing sebanyak 3 kecamatan.

Dilihat dari banyaknya desa dan kelurahan, maka Kabupaten Luwu menempati urutan teratas dengan 290 desa dan kelurahan, disusul oleh Kabupaten Bone dengan 288 desa dan kelurahan, kemudian Kabupaten Gowa 111 desa dan kelurahan, dan Kabupaten Polmas 110 desa dan kelurahan. Yang lainnya masing-masing memiliki tidak lebih dari 103 desa dan kelurahan, dan yang paling sedikit adalah Kotamadya Pare-pare yaitu 12 desa dan kelurahan.

Selanjutnya pada tabel 4.2 berikut ini, akan disajikan luas wilayah menurut Kabupaten dan Kotamadya se Sulawesi Selatan pada tahun 1992.

Tabel 4.2 Luas Daerah dan Penyebaran Penduduk Menurut
Kabupaten/Kotamadya di Sulawesi Selatan Tahun 1992

No	Kabupaten dan Kotamadya	Kepadatan (jiwa/km)	Luas Wilayah (Km ²)	(%)
01	Selayar	109	903,36	1,45
02	Bulukumba	393	1154,67	1,84
03	Bantaeng	367	395,83	0,63
04	Jeneponto	403	737,64	1,18
05	Takalar	367	566,51	0,91
06	Gowa	231	1883,32	3,01
07	Sinjai	238	819,96	1,31
08	Bone	133	4559,00	7,30
09	Maros	149	1619,12	2,59
10	Pangkep	224	1112,29	1,78
11	Barru	126	1174,71	1,88
12	Soppeng	168	1359,44	2,18
13	Wajo	147	2506,19	4,02
14	Sidrap	124	1883,25	3,01
15	Pinrang	153	1961,77	3,14
16	Enrekang	84	1786,01	2,86
17	Luwu	40	17791,43	28,47
18	Tana Toraja	113	3205,77	5,13
19	Polmas	85	4781,53	7,65
20	Majene	139	947,84	1,52
21	Mamuju	18	11057,81	17,70
22	Ujung Pandang	5170	175,77	0,28
23	Pare-pare	1020	99,33	0,16
J u m l a h			62482,54	100

Sumber : - Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan
- Data diolah kembali.

Pada tabel 4.2 di atas, tampak luas Propinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah 62.482,54 km².

Dari 21 kabupaten yang ada, maka yang paling luas adalah Kabupaten Luwu yaitu 17.791,43 km² atau 28,47% dari luas keseluruhan. Kemudian Kabupaten Mamuju seluas 11.057,81 km² atau 17,70% dari luas keseluruhan. Selanjutnya Kabupaten Polmas dengan luas 4.559,00 km² atau 7,30% dari luas keseluruhan. Kabupaten-kabupaten yang lain masing-masing memiliki luas dibawah 7% dari luas keseluruhan. Kotamadya Ujung pandang sebagai ibukota propinsi, seluas 175,77 km² atau 0,28% dari luas keseluruhan, kemudian Kotamadya Pare-pare hanya 0,16% dari luas keseluruhan Propinsi Sulawesi Selatan.

4.1.2. Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan sumber tenaga yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, justru akan menimbulkan hal yang sebaliknya.

Pertambahan penduduk secara terus-menerus akan mengakibatkan bertambahnya jumlah tenaga kerja, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, baik ekonomi maupun sosial.

Pada tabel berikut akan disajikan penduduk Sulawesi Selatan per Kabupaten dan Kotamadya tahun 1972-1992.

Tabel 4.3 Penduduk Sulawesi Selatan per Kabupaten dan
Kotamadya Tahun 1972 - 1992 (jiwa)

No	Kabupaten/ Kotamadya	1972	1975	1982	1987	1992
01	Selayar	94901	101014	94237	95696	98991
02	Bulukumba	267239	288078	309770	328418	338309
03	Bantaeng	91735	106263	123238	138733	146440
04	Jeneponto	204083	222102	246879	254850	296926
05	Takalar	155291	162116	176980	190587	207759
06	Gowa	307685	332329	336172	394128	435714
07	Sinjai	152040	163020	172212	182129	194919
08	Bone	602352	622327	635224	644700	607540
09	Maros	179977	188306	205462	225511	241966
10	Pangkep	205253	208564	221470	232823	249589
11	Barru	133625	138219	137392	143324	147497
12	Soppeng	232146	241010	238075	242235	228454
13	Wajo	327449	372061	377268	383931	369337
14	Sidrap	181974	196023	215139	223263	233087
15	Pinrang	268090	274143	272395	284183	299582
16	Enrekang	124669	131754	134133	139256	150205
17	Luwu	339878	430684	531485	600214	708167
18	Tana Toraja	324431	314613	334176	346113	360913
19	Polmas	317181	353573	366726	387188	408448
20	Majene	79450	96928	122476	128599	131952
21	Mamuju	72335	86571	109562	136662	204327
22	U. Pandang	561328	603022	717585	806129	908775
23	Pare-pare	73156	78668	88806	91746	101362
Jumlah		5292085	5712234	6198863	6600216	7070259

Sumber : Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan

Dari tabel 4.3 tampak bahwa dari tahun 1972 sampai tahun 1992 jumlah penduduk terus-menerus mengalami peningkatan. Pada tahun 1972 penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 5.292.085 jiwa, pada tahun 1977 meningkat menjadi 5.712.234 jiwa, pada tahun 1982 meningkat lagi menjadi 6.600.216 jiwa, dan pada sensus penduduk terakhir tahun 1992 penduduk Sulawesi Selatan mencapai 7.070.259 jiwa.

Pada periode 1972-1992 tersebut, tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun adalah 1,46%. Besarnya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan terutama disebabkan oleh jumlah kelahiran lebih besar dibanding dengan jumlah kematian.

Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun selama periode tersebut tentu merupakan beban bagi penyediaan lapangan kerja. Yang jelas adanya pertambahan penduduk tersebut akan membawa pengaruh terhadap kegiatan pembangunan, seperti :

- a. Pengadaan bahan-bahan pokok yang harus lebih diperbesar melalui peningkatan produksi.
- b. Akan memperbesar jumlah penganggur bila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.
- c. Dapat menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan akibat distribusi pendapatan yang tidak merata.

Oleh karena itu perlu adanya usaha pengaturan penduduk. Dengan pertumbuhan penduduk yang sedikit menurun, otomatis angkatan kerja yang tercipta jumlahnya lebih kecil, sehingga penanganan masalah ketenagakerjaan terutama yang menyangkut lapangan pekerjaan, diharapkan akan lebih mudah.

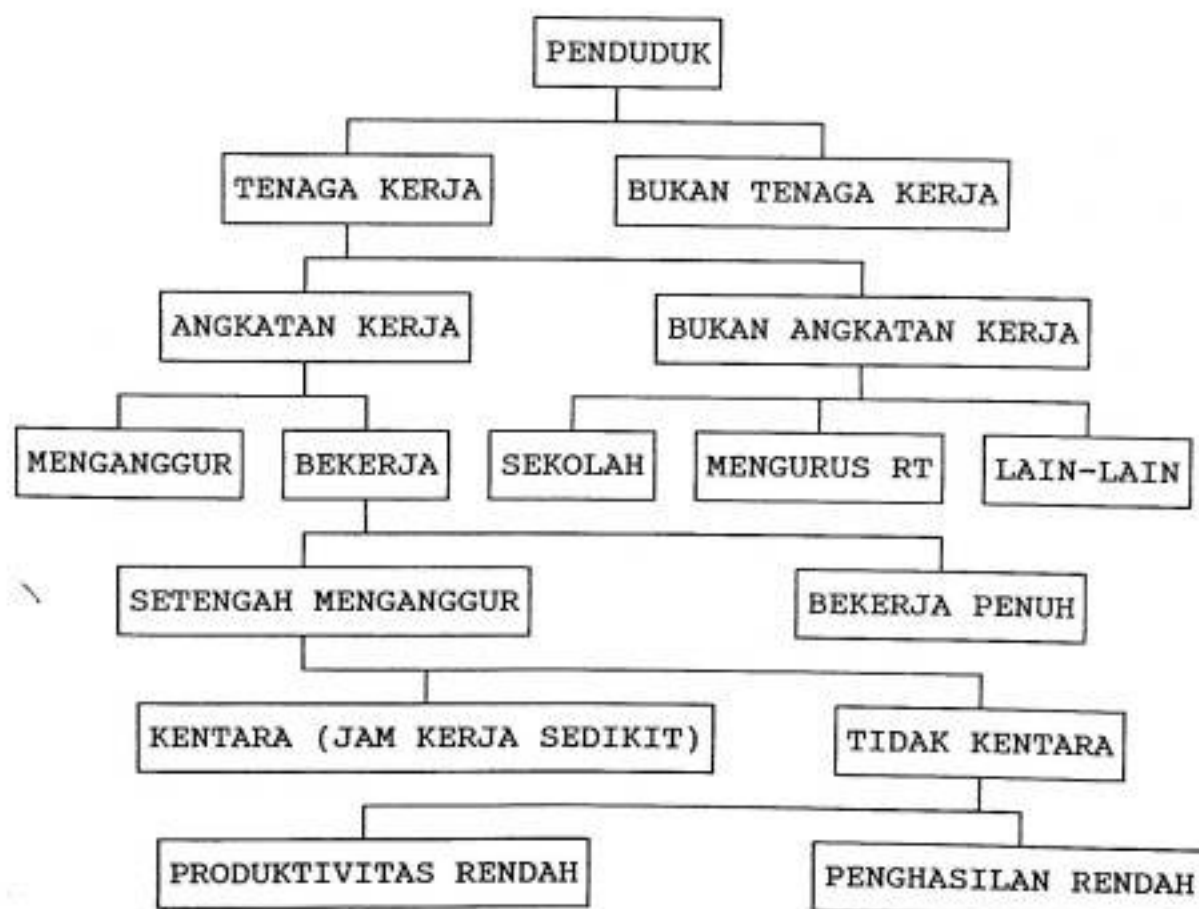
4.1.3. Penyebaran Penduduk

Penyebaran penduduk di Propinsi Sulawesi Selatan sangat tidak merata. Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.3 maka tampak bahwa kabupaten-kabupaten bagian utara pada umumnya kepadatan penduduknya rendah dibandingkan dengan kepadatan penduduk kabupaten-kabupaten bagian selatan. Kabupaten bagian utara seperti Kabupaten Mamuju yang luasnya 17,70% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan, hanya didiami sebanyak 2,9% dari penduduk Propinsi Sulawesi Selatan dengan kepadatan penduduk 18 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Polmas yang luasnya 7,65% dari luas keseluruhan hanya didiami oleh 5,8% dari jumlah keseluruhan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan dengan kepadatan penduduk 85 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kabupaten-kabupaten bagian selatan seperti Kabupaten Jeneponto yang luasnya hanya 1,18% dari luas Propinsi Sulawesi Selatan didiami oleh 3,9% dari jumlah penduduk Propinsi Sulawesi Selatan dengan kepadatan penduduk 403 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Takalar yang luasnya hanya 0,91% dari luas keseluruhan

didiami oleh 2,9% dari jumlah keseluruhan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan dengan kepadatan penduduk sebesar 367 jiwa per kilometer persegi.

4.2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan bagian dari pada penduduk yang terus-menerus meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk di suatu daerah. Sebelum penulis menguraikan dan memberikan pengertian mengenai tenaga kerja yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi, maka terlebih dahulu diperlihatkan bagan dari komposisi penduduk dan tenaga kerja.



Komposisi penduduk dan tenaga kerja sebagaimana terlihat pada gambar di atas bahwa penduduk terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang mencari pekerjaan atau dengan istilah penganggur, sedang yang bekerja mencakup bekerja penuh dan setengah pengangguran. Dan orang yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah, mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan (pensiunan) digolongkan sebagai bukan angkatan kerja tapi sewaktu-waktu dapat bekerja dan memasuki pasar kerja sehingga biasa disebut angkatan kerja potensial.

Di Indonesia istilah angkatan kerja mulai sering dipergunakan untuk mengetahui pengertian tenaga kerja tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pendapat para pakar di bidang ketenagakerjaan.

Menurut Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969 yang menyatakan bahwa :

"Tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat". (Soeroto MA, 1986).

Pengertian tenaga kerja tersebut di atas mengandung maksud bahwa tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif dengan kegiatan produksi karena sebagai sumber daya kekuatan yang senantiasa dapat mendorong kapasitas produksi. Dalam hubungan ini ialah orang-orang yang aktif

melakukan pekerjaan dan memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa yang tidak digunakan oleh diri mereka sendiri tetapi oleh masyarakat luas. Kegunaan dan kerjanya adalah untuk melangsungkan kehidupan masyarakat, juga memberikan gambaran yang lebih kongkrit dari pengertian tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut tenaga kerja dianggap sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan masyarakat.

Endang Sulistyarningsih menyatakan bahwa :

"Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan jumlah penduduk yang cukup besar akan menentukan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui peningkatan produktivitas maupun melalui pendapatan per kapita. Selain itu kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi dari pada barang dan jasa". (Yudo Swasono dan Endang Sulistyarningsih, 1983).

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian yang dimuat dalam Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969 sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini pembinaan terhadap tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Beberapa batasan mengenai tenaga kerja secara umum seperti yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian tenaga kerja di Indonesia menurut *Soepomo* dan *Baharuddin* yang menyatakan bahwa :

"Tenaga kerja di Indonesia ialah tiap warga negara yang mempunyai tenaga, baik merupaka fisik serta mampu dan mau bekerja menggunakan tenaganya tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan dirinya, bangsanya, dan negaranya". (Soepomo dan Baharuddin, 1976).

Kemudian *Soepomo* dan *Baharuddin* juga menyatakan bahwa ciri-ciri tenaga kerja Indonesia adalah :

1. Menyadari bahwa mampunya dia bekerja atau berproduksi dan hasil kerja atau produksi yang benar-benar didapatkan adalah anugrah dari Tuhan Yang Mahaesa.
2. Suka bekerja keras, disiplin, dan produktif.
3. Terampil, memiliki ilmu pengetahuan yang diperlukan dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
4. Bahwa hasil kerjanya dan tujuan dari pada dia bekerja, bukanlah untuk kepentingan pribadinya saja, tapi juga harus dimanfaatkan untuk masyarakat, bangsa dan negaranya, atau harus diorientasikan untuk ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dan gambaran tersebut di atas akan dapatlah dikatakan betapa besar peranan tenaga kerja dalam pembangunan terhadap bangsanya.

Secara praktis tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur. Tiap negara memberikan batas umur yang berbeda, India misalnya memberi batas umur

14-60 tahun. Jadi tenaga kerja adalah penduduk yang berumur antara 14 sampai 60 tahun, sedangkan penduduk yang berumur dibawah 14 tahun dan diatas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja.

Tujuan dari pemilihan batas umur ini adalah supaya defenisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Tiap negara memilih bata sumur yang berbeda karena situasi tenaga kerja di masing-masing negara juga berbeda.

Di Indonesia dipilih batas umur minimum 15 tahun dan bata smaksimum 64 tahun, dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan penduduk yang berumur 64 tahun ke bawah, penduduk dengan umur di luar batas umur tersebut digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Pemilihan umur 15 tahun sebagai umur minimum adalah berdasarkan kenyataan bahwa umur tersebut banyak penduduk yang berumur muda, terutama di daerah pedesaan yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan.

Tenaga kerja atau Man Power terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja terdiri dari :

- (1) Golongan bekerja
- (2) Golongan yang mencari pekerjaan

Bukan angkatan kerja terdiri dari :

- (1) Golongan yang bersekolah
- (2) Golongan yang mengurus rumah tangga
- (3) Golongan lain-lain

Penduduk Propinsi Sulawesi Selatan Yang berusia 15-64 tahun menunjukkan peningkatan, seperti tampak pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Penduduk Sulawesi Selatan Usia 15-64 tahun
Menurut Jenis Kegiatan (jiwa)

Kegiatan	1972	1982	1992
1. Angkatan kerja	1014809	1668827	2744344
- Bekerja	988120	1624937	2672168
- Mencari pekerjaan	26689	43890	72176
2. Bukan angkatan kerja	2285458	2600564	2959116
- Sekolah	501863	664753	706244
- Mengurus rumah tangga	1393489	1575094	1850737
- Lain-lain	390106	308717	420135
J u m l a h	3300267	4269291	5703460

Sumber : Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Propinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dari 3.300.267 jiwa pada tahun 1972 menjadi 4.269.291 jiwa pada tahun 1982 dan 5.703.460 jiwa pada tahun 1992, dengan rata-rata pertumbuhan 2,77% per tahun.

Sebagian besar dari mereka di daerah pedesaan, meskipun demikian ternyata pertumbuhan di daerah kota lebih tinggi. Hal ini karena proses pembangunan dan perkembangan ekonomi umumnya di daerah kota lebih cepat

dari pada di daerah pedesaan, sehingga banyak penduduk usia kerja pergi ke kota, baik untuk bekerja maupun untuk melanjutkan sekolah di kota.

Perkembangan penduduk usia kerja di kota yang cepat tersebut perlu mendapat perhatian khusus.

4.2.1. Angkatan Kerja

Termasuk dalam kelompok ini adalah penduduk dalam usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Dari tabel 4.4 tampak bahwa angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang sedang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1972 jumlah angkatan kerja Propinsi Sulawesi Selatan 1.014.809 jiwa kemudian pada tahun 1982 menjadi 1.668.827 jiwa dan pada tahun 1992 berjumlah 2.744.344 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 5,10% per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk usia kerja untuk periode yang sama sebesar 2,77% perkembangan angkatan kerja yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk usia 15-64 tahun disebabkan karena meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja.

Pada tabel berikut menggambarkan angkatan kerja di Propinsi Sulawesi Selatan yang dibagi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Tabel 4.5 Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Sulawesi Selatan (jiwa)

Pendidikan yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Laju Pertumbuhan (%)
	1985	1987	1992	
Tidak tamat SD	823917	808163	769823	-0,99
Belum tamat SD	601705	646805	774823	3,68
Tamat SD	304073	369401	601037	10,26
Tamat SLTP Umum	75144	90544	144300	13,06
Tamat SLTP Kejuruan	15930	10156	30791	9,88
Tamat SLTA Umum	46373	61927	127647	15,57
Tamat SLTA Kejuruan	70498	86392	143613	10,70
Akademi, Dip, I/II	10261	13400	26732	14,64
Universitas, Sarjana	8952	11002	18426	10,86

Sumber : - Kantor Depnaker Prop. Sulawesi Selatan
- Data diolah kembali

Pada tabel 4.5 menunjukkan keadaan yang cukup menggembirakan dimana dapat dilihat bahwa pertumbuhan angkatan kerja yang berpendidikan formal cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tidak tamat Sekolah Dasar pada tahun 1985 sebanyak 823.917 jiwa, dua tahun kemudian menurun menjadi 808.163 jiwa dan menurun lagi menjadi 769.823 jiwa pada tahun 1992 dengan rata-rata pertumbuhan -0,99% per tahun. Angkatan kerja yang belum tamat Sekolah Dasar mengalami kenaikan selama tahun 1985 hingga tahun 1992 dengan laju pertumbuhan sebesar 3,68 % rata-rata per tahun. Sedangkan angkatan kerja yang telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 1985 berjumlah 304.073 jiwa menjadi 601.037 jiwa pada tahun 1992 dengan laju pertumbuhan sebesar 10,26% rata-rata per tahun.

Angkatan kerja yang telah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Umum dan Kejuruan juga mengalami perkembangan yang cukup tinggi selama tahun 1985 hingga tahun 1992 dengan laju pertumbuhan sebesar 13,06% dan 9,88% rata-rata per tahun. Hal yang sama juga terjadi pada angkatan kerja yang tamat Sekolah Menengah Atas Umum dan Kejuruan, pada tahun 1985 masing-masing berjumlah 46.373 jiwa dan 70.498 jiwa, pada tahun 1992 masing-masing meningkat menjadi 127.647 jiwa dan 143.613 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 15,57% dan 10,70% per tahun.

Jumlah angkatan kerja yang telah menamatkan pendidikan pada tingkat Akademi dan Diploma I/II mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu dari 10.261 jiwa pada tahun 1985 menjadi 26.732 jiwa pada tahun 1992 dengan laju pertumbuhan rata-rata 14,66% per tahun. Sedangkan pada tingkat Sarjana juga terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 8.952 jiwa pada tahun 1985 kemudian meningkat menjadi 18.426 jiwa pada tahun 1992 dengan laju pertumbuhan sebesar 10,86% rata-rata per tahun.

4.2.2. Bukan Angkatan Kerja.

Kelompok ini adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi sama sekali, sebagian dari mereka memang secara potensial bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang sudah lanjut usia atau sakit yang tidak memungkinkan

untuk bekerja. Mereka yang aktivitasnya menhurus rumah tangga atau sekolah dapat sewaktu-waktu masuk ke dalam angkatan kerja, sehingga menaikkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

Pada tabel 4.4 tampak bahwa penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang termasuk bukan angkatan kerja pada tahun 1972 sebesar 2.285.458 jiwa kemudian pada tahun 1982 menjadi 2.600.564 jiwa dan pada tahun 1992 mencapai 2.959.116 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,30% per tahun. Aktivitas kelompok bukan angkatan kerja selama kurun waktu 1972-1992 mengalami perubahan yang membaik, terutama golongan yang bersekolah. Pada golongan yang bersekolah pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 4,66% jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan golongan mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain yang mempunyai rata-rata pertumbuhan per tahun masing-masing sebesar 1,20% dan 0,15%.

Secara umum dapat digambarkan struktur penduduk dan tenaga kerja di Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari jumlah tenaga kerja, jumlah angkatan kerja, dan jumlah penduduk yang tergolong di luar bata usia tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Struktur Penduduk dan Tenaga Kerja

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1972-1992

Tahun	Tenaga Kerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Penduduk diluar Usia Kerja	Penduduk
1972	3300267	1014809	2285458	1991818	5292085
1973	3381733	1066564	2315169	1987617	5369350
1974	3466225	1120959	2345266	1981517	5447742
1975	3553882	1178128	2375754	1973397	5527279
1976	3644851	1234212	2406639	1963126	5607977
1977	3739285	1301360	2437925	1972949	5712234
1978	3837348	1367730	2469618	1958285	5795633
1979	3939208	1437485	2501723	1941041	5880249
1980	4045042	1510746	2534246	1921050	5966100
1981	4155038	1587847	2567191	1898160	6053206
1982	4269291	1668827	2600564	1929572	6198863
1983	4388309	1753937	2634372	1901057	6289366
1984	4512006	1843388	2668618	1869185	6381191
1985	4640711	1937401	2738310	1833646	6474357
1986	4774661	2036208	2738453	1794221	6600216
1987	4914108	2140055	2774053	1686108	6794349
1988	5059314	2445198	2810116	1637265	6696597
1989	5210555	2363907	2846648	1583794	6794349
1990	5368120	2484466	2883654	1500122	6868242
1991	5532316	2611174	2921142	1436203	6968519
1992	5703460	2744344	2959116	1366799	7070259

Sumber : Kantor Depnaker Prop. Sulawesi Selatan.

4.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan angkatan kerja sangat tergantung pada perkembangan penduduk usia 15-64 tahun dan berapa bagian dari mereka yang bekerja atau mencari pekerjaan. Lazimnya, persentase yang termasuk angkatan kerja ini dinamakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Makin tinggi tingkat perkembangan penduduk usia 15-64 tahun makin tinggi pula TPAK-nya, maka makin besar pula jumlah angkatan kerjanya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan pendidikan. Disamping itu juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi secara keseluruhan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja dalam kelompok yang sama.

Berdasarkan tabel 4.4 tampak bahwa 1972 hingga tahun 1992 terjadi peningkatan TPAK. Pada tahun 1972 sebesar 30,75% kemudian pada tahun 1982 menjadi 39,09%, selanjutnya pada tahun 1987 meningkat menjadi 43,55%, dan pada tahun 1992 naik lagi hingga mencapai 48,12%.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, terutama untuk golongan umur muda dan lanjut usia. Hal ini karena sifat pekerjaan daerah pedesaan yang umumnya tradisional kekeluargaan, usaha sendiri dan sangat fleksibel serta tidak mensyaratkan umur ataupun jenis kelamin. TPAK anak-anak pedesaan lebih tinggi karena kesempatan dan kesadaran bersekolah lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak kota. Perempuan lebih banyak berpartisipasi dalam angkatan kerja di pedesaan karena kebutuhan untuk menambah pendapatan keluarga, sedang sifat pekerjaan di pedesaan memudahkan mereka untuk bekerja.

BAB V

ANALISA PEMBAHASAN

5.1. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan

Kegiatan ekonomi penduduk yang bekerja tercermin dalam bentuk Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan dari berbagai sektor atau lapangan kerja penduduk.

Pada dua dasawarsa terakhir ini situasi perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan kecenderungan yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan adanya kecenderungan yang semakin baik pada dua indikator yang sangat relevan dan urgen untuk diteliti, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan laju pertumbuhan penduduk yang semakin kecil.

Selama kurun waktu 1972-1992 laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan mencapai rata-rata 8,57% per tahun. Sementara itu pertumbuhan penduduk pada periode yang sama mencapai rata-rata 1,46% per tahun. Berarti pertumbuhan ekonomi di daerah ini telah jauh melampaui laju pertumbuhan penduduk.

Implikasi lebih jauh dari kenyataan ini mengatakan bahwa produktivitas penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kata lain jika produktivitas ini juga

dianggap dapat menggambarkan teknologi dari sudut ekonomi maka selama periode yang sama telah terjadi perkembangan teknologi rata-rata 7,11% setiap tahun.

Gambaran selengkapnya tentang laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan yang diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto serta persentase distribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1983, Periode 1972-1992 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Pertanian	Pertambangan, Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik Gas, dan Air	Bangunan dan Konstruksi	Perdagangan, Restoran, Hotel	Angkutan dan Komunikasi	Lembaga Keuangan dan Bank	Jasa - jasa, Pemerintahan	Total
1972	323803.79	1603.93	23533.15	2264.30	15438.40	111193.51	46409.75	14171.01	79368.42	617786.26
1973	341095.15	1780.28	25192.84	2525.71	18001.45	118985.11	49490.79	15759.57	83762.13	656593.03
1974	389496.55	1910.93	31281.48	2975.64	18227.65	136071.65	58213.35	16416.94	96562.34	751156.53
1975	478686.27	2117.83	37692.10	3535.30	19908.12	160388.06	68344.62	20129.93	106054.87	897057.10
1976	493314.90	2231.91	41113.88	3828.59	20799.54	176053.30	84743.57	23725.25	107020.12	952831.06
1977	576886.86	2457.21	46454.77	4357.84	26530.61	206451.56	88620.16	27023.78	125189.70	1103972.49
1978	639576.76	2703.13	49209.21	5150.94	26174.68	226245.04	100540.55	31881.64	137075.11	1218557.06
1979	655352.05	3455.18	50317.03	6032.87	28290.10	246964.55	112453.08	41291.81	152765.41	1296922.08
1980	689517.71	7774.70	63039.42	7185.51	36536.31	259157.19	135941.00	52961.49	163544.02	1415657.35
1981	723039.45	9779.12	66508.44	8285.58	40808.25	275769.90	155044.78	75123.50	176566.79	1530925.81
1982	739943.76	11051.67	71392.35	10719.49	50428.68	280844.80	159196.94	98105.28	194185.23	1615868.20
1983	777077.38	12588.13	75236.79	15554.19	61100.14	317102.87	171254.42	124590.02	195137.65	1749641.59
1984	819500.66	15089.76	76397.55	17454.37	62047.32	329345.73	172850.84	130080.16	203419.85	1826386.24
1985	870762.50	16144.98	77615.99	19435.11	67900.47	356898.57	178464.76	135303.70	224026.03	1946552.11
1986	939784.63	17352.29	94547.21	20746.39	73003.67	376941.82	189412.80	137905.95	229427.28	2079122.04
1987	979007.11	17506.55	133607.83	24898.11	84231.81	394089.75	209093.55	139929.09	244062.92	2226826.72
1988	1026996.53	18699.70	149578.04	27629.53	91399.55	419360.75	223038.56	147176.87	259280.04	2363159.57
1989	1101251.69	19803.22	164414.64	31062.39	99488.18	442139.58	237047.82	156263.10	271550.37	2523080.99
1990	1184937.80	21555.43	190724.76	33774.96	107002.18	466130.31	255325.94	164252.08	287548.40	2711251.86
1991	1282530.44	24193.88	227639.32	36180.25	114963.14	545943.22	272206.02	170413.47	312683.20	2986752.94
1992	1355977.06	29718.45	249948.33	38215.91	124570.71	595261.29	285664.66	182905.93	337658.52	3199920.86
L.P	7,42%	15,72%	12,54%	15,18%	11,00%	8,75%	9,51%	13,64%	7,51%	8,75%

Sumber : - Kantor Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan
- Data diolah kembali

Tabel 5.2 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1983, Periode 1972-1992 (%)

Tahun	Pertanian	Pertambangan, Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik Gas, dan Air	Bangunan dan Konstruksi	Perdagangan, Restoran, Hotel	Angkutan dan Komunikasi	Lembaga Keu- angan dan Bank	Jasa-jasa, Pemerintahan	Total
1972	52,41	0,26	3,81	0,37	2,50	18,00	7,51	2,29	12,85	100
1973	51,95	0,27	3,84	0,38	2,74	18,12	7,54	2,16	12,76	100
1974	51,85	0,25	4,16	0,40	2,43	18,11	7,75	2,19	12,86	100
1975	53,36	0,24	4,20	0,39	2,22	17,88	7,64	2,24	11,82	100
1976	51,77	0,23	4,31	0,40	2,18	18,48	8,89	2,49	11,23	100
1977	52,26	0,22	4,21	0,39	2,40	18,70	8,03	2,45	11,34	100
1978	52,49	0,22	4,04	0,42	2,15	18,57	8,25	2,62	11,25	100
1979	50,53	0,27	3,88	0,47	2,18	19,04	8,67	3,18	11,78	100
1980	48,71	0,55	4,45	0,51	2,58	18,31	9,60	3,74	11,55	100
1981	47,23	0,64	4,34	0,54	2,67	18,01	10,13	4,91	11,53	100
1982	45,79	0,68	4,42	0,66	3,12	17,38	9,85	6,07	12,02	100
1983	44,41	0,72	4,30	0,89	3,49	18,12	9,79	7,12	11,15	100
1984	45,04	0,83	4,21	0,96	3,41	18,10	9,50	7,15	11,18	100
1985	44,73	0,83	3,99	1,00	3,49	18,33	9,17	6,95	11,51	100
1986	45,04	0,83	4,55	1,00	3,51	18,13	9,11	6,63	11,03	100
1987	45,18	0,83	6,17	1,15	3,89	18,19	9,65	6,46	11,26	100
1988	43,46	0,79	6,33	1,17	3,87	17,75	9,44	6,23	10,97	100
1989	43,63	0,79	6,52	1,23	3,94	17,52	9,40	6,19	10,76	100
1990	43,70	0,80	7,03	1,25	3,95	17,19	9,42	6,01	10,61	100
1991	46,10	0,87	8,18	1,30	4,13	19,62	9,78	6,13	11,24	100
1992	42,38	0,93	7,81	1,19	3,89	18,61	8,93	5,72	10,55	100

Sumber : - Tabel 5.1
- Data diolah kembali

Rata-rata pertumbuhan selama empat tahun PELITA V telah mencapai 8,24% per tahun, hal ini berarti sasaran REPELITA V untuk mencapai laju pertumbuhan sebesar 5,00% telah berhasil dilampaui.

Untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,94% selama periode 1983-1992, atau bahkan lebih besar lagi tampaknya masih memungkinkan.

Pertama-tama mengingat Propinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber-sumber daya alam yang sangat potensial misalnya Kabupaten Luwu yang potensi dengan pertambangan dan alam yang subur, Kabupaten Polmas dan Mamuju yang menjadi daerah tujuan transmigrasi dan mempunyai prospek yang baik untuk pengembangan sektor pertanian. Selain itu Kabupaten Tanatoraja dengan warisan budayanya yang tinggi, sangat berpotensi untuk dikembangkan sektor pariwisatanya serta Kabupaten Bulukumba dengan pantai putihnya. Kesemuanya ini jika mendapat penanganan yang lebih intensif dan terarah maka bukan suatu hal yang tidak mungkin akan semakin meningkatkan hasil yang selama ini telah dicapai.

Kedua, jika kita perhatikan hasrat kewiraswastaan yang diukur berdasarkan mobilitas ekonomi di setiap wilayah yang semakin menunjukkan adanya kecendrungan terus meningkat misalnya jumlah kendaraan angkutan umum dari waktu ke waktu, sentra-sentra perdagangan yang terus

bermunculan, semakin kompleks dan meningkatnya kegiatan-kegiatan sektor jasa dan tak kalah pentingnya adalah volume ekspor non-migas yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

Ketiga adalah sumber daya manusia, jika kita perhatikan tabel 4.5 jumlah penduduk lulusan perguruan tinggi (tingkat sarjana) pada tahun 1985 berjumlah 8.952 jiwa kemudian naik menjadi 18.426 jiwa pada tahun 1992, dengan laju pertumbuhan rata-rata 10,86% per tahun. Namun suatu hal yang menjadi persoalan adalah apakah potensi sumber daya manusia tersebut telah terserap seoptimal mungkin. Berkaitan atas hal tersebut menurut ahli-ahli ekonomi pembangunan masalah yang banyak dihadapi oleh daerah-daerah yang sedang berkembang adalah Underemployment. Sehingga jika kita berhasil mengatasi masalah ini maka akan semakin terbuka peluang untuk meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai selama ini.

5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Titik berat pembangunan ekonomi masih difokuskan pada pembangunan sektor pertanian yang didukung oleh industri yang kuat. Kedua sektor ini memang sudah semestinya menjadi perhatian utama karena kedua sektor ini merupakan fokus dari sektor primer dan sekunder yang secara langsung menyentuh kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan manusia. Disamping itu pertumbuhan

sektor ini akan merangsang pertumbuhan sektor lainnya dengan jalan pengembangan sistem distribusi.

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, sektor pertanian tampaknya masih akan menjadi sektor yang dominan dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan sektor ini mencapai 7,42% per tahun selama kurun waktu 1972-1992. Dengan kekayaan alam yang masih melimpah serta sumber-sumber yang belum dimanfaatkan tampaknya sektor ini masih dapat dipacu. Hasil yang telah kita capai dalam penyediaan beras diiringi pula oleh peningkatan hasil-hasil pertanian lainnya sehingga telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan jutaan petani.

Sektor pertambangan dan penggalian, perkembangannya sejalan dengan sektor bangunan dan konstruksi. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mencapai rata-rata 15,72% per tahun, sedangkan sektor bangunan dan konstruksi 11,00% per tahun.

Suatu peralihan dalam struktur perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan telah terjadi melalui pertumbuhan yang cepat dalam sektor industri, yaitu pertumbuhannya mencapai rata-rata 12,54% setiap tahun selama periode yang diamati.

Pertumbuhan yang cukup tinggi ini ditandai juga dengan situasi perekonomian yang semakin sehat dan sangat menunjang bagi terciptanya sentra-sentra industri. Dengan demikian sektor industri pengolahan memiliki peran

sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sekaligus mendorong proses perubahan struktur ekonomi regional ke arah yang lebih kokoh, kedua sebagai sumber perluasan lapangan kerja yang semakin meningkat dan penyumbang pendapatan daerah dengan meningkatkan peran ekspor hasil industri.

Laju pertumbuhan sektor listrik, gas, dan air selama tahun 1972-1992 adalah sebesar 15,18% rata-rata per tahun. Pada tahun 1972 kontribusi sektor ini hanya mencapai 3,18% dan pada tahun 1992 naik hingga mencapai 7,81% terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto.

Kontribusi sektor perdagangan, restoran, dan hotel terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi selama kurun waktu yang diamati, yaitu tahun 1972 sebesar 18,00%, kemudian pada tahun 1977 naik menjadi 18,70%, pada tahun 1982 turun menjadi 18,01%. Kemudian pada tahun 1987 menjadi 18,19%, pada tahun 1992 naik hingga mencapai 18,61%. Laju pertumbuhan sektor ini pada sektor yang sama yaitu rata-rata 8,75% setiap tahun.

Selanjutnya sektor angkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 9,51% rata-rata per tahun. Kontribusi sektor ini selama periode 1972-1992 terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor angkutan dan

komunikasi pada tahun 1972 mencapai 7,5%, kemudian naik menjadi 10,13% pada tahun 1982, kemudian tahun 1992 turun menjadi 8,93%. Namun demikian secara absolut Produk Domestik Regional Bruto sektor angkutan dan komunikasi dari tahun ke tahun selama periode yang diamati terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 1972 berjumlah 46.409,75 jutaan rupiah, kemudian naik menjadi 159.196,94 jutaan rupiah, kemudian naik lagi hingga mencapai 289.664,66 jutaan rupiah.

Sektor lembaga keuangan dan bank mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 13,64% rata-rata setiap tahun selama dua dasawarsa terakhir ini. Dari data yang ada menunjukkan sektor lembaga keuangan dan bank mempunyai andil sebesar 5,72% terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan atau 182.905,93 jutaan rupiah pada tahun 1992.

Kontribusi sektor jasa-jasa dan pemerintahan tahun 1972 sebesar 12,85%, turun menjadi 11,53% pada tahun 1982, kemudian pada tahun 1992 turun lagi menjadi 10,55% terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan. Secara absolut dari tabel 5.1 dapat kita lihat Produk Domestik Regional Bruto sektor jasa-jasa dan pemerintahan pada tahun 1972 adalah sebesar 79.368,42 jutaan rupiah, kemudian meningkat hingga

mencapai 337.658,52 jutaan rupiah pada tahun 1992 dengan laju pertumbuhan sebesar rata-rata 7,51% setiap tahun.

Akibat dari perubahan kontribusi masing-masing sektor terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, maka jelas akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor.

Setelah kesembilan sektor di atas disederhanakan menjadi tiga sektor yang terdiri dari Sektor Primer, Sekunder Tersier maka gambaran Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan akan tampak hasilnya sebagai berikut :

Tabel 5.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1983, Periode 1972-1992 (Jutaan Rupiah)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
1972	323803,79	89249,53	204732,94
1973	341095,15	96991,07	218506,81
1974	389496,55	112559,05	249100,93
1975	478686,27	131597,97	286772,86
1976	493314,90	152817,54	306698,62
1977	576886,86	168421,00	358664,63
1978	639576,76	183778,51	395201,79
1979	655352,05	200548,26	441021,77
1980	689517,71	250476,94	475662,35
1981	723039,45	280426,17	527460,19
1982	739943,76	302789,69	573135,31
1983	777077,38	335733,69	636830,61
1984	819500,66	344039,84	662845,74
1985	870762,50	359561,26	716228,35
1986	939784,63	394862,36	744475,05
1987	979007,11	469737,85	778081,76
1988	1026996,53	510145,38	826017,66
1989	1101251,69	551876,25	869953,05
1990	1184937,80	608383,27	917930,79
1991	1282530,44	675182,56	1029039,94
1992	1355977,06	728118,02	1115825,78
LP	7,42%	10,57%	8,41%

Sumber : - Tabel 5.1
- Data diolah kembali

Tabel 5.4 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 1983, Periode 1972-1992 (%)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
1972	52,41	14,45	33,41
1973	51,95	14,77	33,28
1974	51,85	14,99	33,16
1975	53,36	14,67	31,97
1976	51,77	16,04	32,19
1977	52,26	15,25	32,49
1978	52,49	15,08	32,43
1979	50,53	15,46	34,01
1980	48,71	17,69	33,60
1981	47,23	18,32	34,45
1982	45,79	18,74	35,47
1983	44,41	19,19	36,40
1984	45,04	18,67	36,29
1985	44,73	18,48	36,79
1986	45,04	19,15	35,81
1987	45,18	19,88	34,94
1988	43,46	21,59	34,95
1989	43,65	21,87	34,48
1990	43,70	22,44	33,86
1991	46,10	22,75	34,45
1992	42,38	22,75	34,87

Sumber : - Tabel 5.3
- Data diolah kembali

Dari tabel tersebut tampak bahwa pertumbuhan rata-rata per tahun dari Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier masing-masing sebesar 7,42%, 10,57%, dan 8,41% rata-rata setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari persentase sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, maka Sektor Primer merupakan "leading sector", dimana sumbangannya pada tahun 1992 adalah sebesar 42,38%. Disusul oleh Sektor Tersier sebesar 34,87% dan yang terkecil adalah Sektor Sekunder yang hanya sebesar 22,75% dari total jumlah Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 3199920.86 jutaan rupiah.

5.2. Kesempatan Kerja Propinsi Sulawesi Selatan

Perkembangan kesempatan kerja di Propinsi Sulawesi Selatan selama periode 1972-1992 tampak pada tabel berikut ini, dan secara berturut-turut akan diuraikan perkembangan kesempatan kerja dan baik secara sektoral maupun secara keseluruhan.

Tabel 5.5 Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972 - 1992 (Jawa)

Tahun	Pertanian	Pertambangan, Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air	Bangunan dan Konstruksi	Perdagangan, Restoran, Hotel	Angkutan dan Komunikasi	Lembaga Keuangan dan Bank	Jasa-jasa, Pemerintahan	Total
1972	735,331	6,089	46,478	5,378	17,049	72,559	15,222	4,262	112,441	1,014,809
1973	752,568	6,613	53,008	5,653	18,238	78,712	16,532	4,479	129,481	1,065,284
1974	783,438	7,062	56,721	6,053	19,392	87,211	18,496	6,165	136,421	1,120,959
1975	814,911	7,776	67,389	6,598	21,324	93,072	20,382	7,069	139,608	1,178,129
1976	844,201	8,269	70,844	7,035	22,586	99,107	23,080	7,776	151,314	1,234,212
1977	879,719	8,979	89,924	7,678	25,507	105,931	25,246	8,459	149,917	1,301,360
1978	918,294	9,848	96,972	8,343	27,765	118,445	28,859	9,027	163,854	1,381,407
1979	957,509	10,637	110,974	9,200	30,331	132,680	32,343	10,206	151,080	1,444,960
1980	997,243	11,331	125,996	9,820	33,085	148,506	36,109	10,726	137,931	1,510,747
1981	1,037,340	12,226	138,779	10,639	36,044	161,643	40,331	11,909	138,937	1,587,848
1982	1,079,898	13,184	150,028	11,849	39,217	174,726	45,058	12,683	142,184	1,668,827
1983	1,094,281	14,207	161,362	12,804	42,796	191,355	50,513	13,856	172,763	1,753,937
1984	1,102,714	15,484	173,831	13,088	46,269	215,861	56,408	15,116	204,616	1,843,387
1985	1,125,243	16,662	188,315	14,531	50,760	231,907	62,966	16,080	230,938	1,937,402
1986	1,174,281	17,919	201,788	16,086	55,385	254,322	70,453	17,715	228,259	2,036,208
1987	1,213,411	19,046	224,278	17,548	60,778	277,779	78,754	18,618	229,842	2,140,054
1988	1,230,593	20,207	236,644	18,635	65,784	313,654	88,012	19,982	251,687	2,245,198
1989	1,271,073	21,984	250,811	20,093	71,626	338,511	98,575	21,275	269,958	2,363,906
1990	1,274,034	23,354	266,583	21,366	78,261	365,217	110,062	23,354	322,235	2,484,466
1991	1,283,392	25,067	301,329	23,501	85,124	415,177	122,986	24,806	329,791	2,611,173
1992	1,290,391	26,620	323,284	25,522	92,759	445,133	132,277	26,895	381,464	2,744,345
I.P.	2,85%	7,65%	10,18%	8,01%	8,84%	9,49%	10,81%	9,65%	6,30%	5,10%

Sumber : - Kantor Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan
 - Data diolah kembali
 - LP=Laju Pertumbuhan



Tabel 5.6 Persentase Kesempatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992 (%)

Tahun	Pertanian	Pertambangan; Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air	Bangunan dan Konstruksi	Perdagangan, Restoran, Hotel	Angkutan dan Komunikasi	Bank dan Keuangan	Jasa-jasa, Pemerintahan
1972	72,46	0,60	4,58	0,53	1,68	7,15	1,50	0,42	11,08
1973	70,56	0,62	4,97	0,53	1,71	7,38	1,55	0,54	12,14
1974	69,89	0,63	5,06	0,54	1,73	7,78	1,65	0,55	12,17
1975	69,17	0,66	5,72	0,56	1,81	7,90	1,73	0,60	11,85
1976	68,40	0,67	5,74	0,57	1,83	8,03	1,87	0,63	12,26
1977	67,60	0,69	6,91	0,59	1,96	8,14	1,94	0,65	11,52
1978	67,14	0,72	7,09	0,61	2,03	8,66	2,11	0,66	11,98
1979	66,61	0,74	7,72	0,64	2,11	9,23	2,25	0,71	10,51
1980	66,01	0,75	8,34	0,65	2,19	9,83	2,39	0,71	9,13
1981	65,33	0,77	8,74	0,67	2,27	10,18	2,54	0,75	8,75
1982	64,71	0,79	8,99	0,71	2,35	10,47	2,70	0,76	8,52
1983	62,39	0,81	9,20	0,73	2,44	10,91	2,88	0,79	9,85
1984	59,82	0,84	9,43	0,71	2,51	11,71	3,06	0,82	11,10
1985	58,08	0,86	9,72	0,75	2,62	11,97	3,25	0,83	11,92
1986	57,67	0,88	9,91	0,79	2,72	12,49	3,46	0,87	11,21
1987	56,70	0,89	10,48	0,82	2,84	12,98	3,68	0,87	10,74
1988	54,81	0,90	10,54	0,83	2,93	13,97	3,92	0,89	11,21
1989	53,77	0,93	10,61	0,85	3,03	14,32	4,17	0,90	11,42
1990	51,28	0,94	10,73	0,86	3,15	14,70	4,43	0,94	12,97
1991	49,15	0,96	11,54	0,90	3,26	15,90	4,71	0,95	12,63
1992	47,02	0,97	11,78	0,93	3,38	16,22	4,82	0,98	13,90

Sumber : - Tabel 5.3
- Data diolah kembali

Bila dilihat secara sektoral pada tabel 5.2 dan tabel 5.3 tampak bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian pada tahun 1972 adalah sebesar 735.331 jiwa, sepuluh tahun kemudian sektor ini mampu menyerap penduduk yang bekerja sebanyak 1.079.898 jiwa. Kemudian pada tahun 1992 meningkat lagi hingga mencapai 1.290.391 jiwa. Dari jumlah penduduk yang bekerja secara keseluruhan yaitu 2.744.344 jiwa pada tahun 1992 berarti bahwa hampir setengah dari jumlah tersebut (47,02%) terserap atau bekerja di sektor pertanian. Laju pertumbuhan penduduk usia kerja sektor pertanian selama kurun waktu yang diamati adalah sebesar rata-rata 2,85% setiap tahun.

Komposisi penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan persentase yang hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu berarti, yaitu 6.089 jiwa atau 0,60% dari total penduduk yang bekerja pada tahun 1972 yaitu 1.014.809 jiwa. Kemudian naik menjadi 13.184 jiwa atau 0,79% pada tahun 1982, dan naik lagi menjadi 26.620 jiwa atau 0,97% dari seluruh penduduk yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 1992, dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,65% per tahun.

Jumlah penduduk yang bekerja atau terserap di sektor industri pengolahan pada tahun 1972 yaitu sebesar 46.478 jiwa atau 4,58% dari seluruh penduduk yang bekerja

di masing-masing sektor. Dengan laju kesempatan kerja sektor industri pengolahan yang cukup tinggi yaitu rata-rata 10,18% per tahun, maka pada tahun 1983 sektor ini mampu menampung penduduk yang bekerja sebanyak 161.362 jiwa. Kemudian pada tahun 1992 meningkat lagi menjadi 323.284 jiwa atau 11,78% dari jumlah penduduk yang bekerja di masing-masing sektor.

Perkembangan kesempatan kerja sektor listrik, gas, dan air sejalan dengan perkembangan sektor lembaga keuangan dan bank. Pertumbuhan kesempatan kerja sektor listrik, gas, dan air mencapai rata-rata 8,01% per tahun, sedangkan sektor lembaga keuangan dan bank yaitu rata-rata 9,65% setiap tahun selama dua dasawarsa terakhir. Kemampuan sektor listrik, gas, dan air untuk menyerap tenaga kerja hampir tidak mengalami perubahan selama tahun yang diamati, yaitu tahun 1972 sektor ini hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,53% dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja, kemudian pada tahun 1992 menjadi 0,93% dari 2.744.344 jiwa penduduk yang bekerja. Sedangkan sektor lembaga keuangan dan bank mampu menyerap penduduk yang bekerja sebanyak 4.262 jiwa pada tahun 1972, kemudian naik hingga mencapai 26.895 jiwa pada tahun 1992, dengan pertumbuhan rata-rata 9,65% setiap tahun selama periode 1972-1992.

Komposisi penyerapan tenaga kerja sektor bangunan dan konstruksi tahun 1972 sebanyak 17.049 jiwa atau 1,68%

dari seluruh penduduk yang bekerja. Mengalami kenaikan hingga tahun 1982 menjadi 2,35%, kemudian naik lagi menjadi 3,38% dari total penduduk yang bekerja tahun 1992 atau 92.759 jiwa, dengan perkembangan 8,84% rata-rata per tahun.

Pertumbuhan kesempatan kerja sektor perdagangan, restoran, dan hotel dengan sektor angkutan dan komunikasi cukup tinggi selama dua dasawarsa terakhir, yaitu masing-masing rata-rata 9,49% dan 10,81% tiap tahun. Persentase penyerapan tenaga kerja kedua sektor tersebut tahun 1972 masing-masing 7,15% dan 1,50% dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja, atau secara absolut masing-masing 72.559 jiwa dan 15.222 jiwa. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi maka dua puluh tahun kemudian atau pada tahun 1992 sektor perdagangan, restoran, dan hotel serta sektor angkutan dan komunikasi masing-masing mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 445.133 jiwa dan 132.277 jiwa, atau 16,22% dan 4,82% dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja di masing-masing sektor.

Jumlah penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa dan pemerintahan pada tahun 1972 sebanyak 112.441 jiwa menjadi 381.464 jiwa pada tahun 1992, dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,30% setiap tahun selama periode 1972-1992. Dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang bekerja, maka persentase penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa dan pemerintahan dari tahun ke tahun

selama periode yang sama mengalami fluktuasi, yaitu 11,08% pada tahun 1972 menjadi 11,52% pada tahun 1977. Kemudian pada tahun 1982 turun menjadi 8,52%, meningkat lagi menjadi 13,90% dari total penduduk yang bekerja di masing-masing sektor tahun 1992.

Secara keseluruhan kesempatan kerja di Propinsi Sulawesi Selatan selama dua puluh tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu 1.014.809 jiwa pada tahun 1972 kemudian pada tahun 1982 menjadi 1.668.827 jiwa. Dan tahun 1992 meningkat lagi hingga mencapai 2.744.344 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar rata-rata 5,10% per tahun.

Apabila kesembilan sektor di atas disederhanakan menjadi tiga sektor maka gambaran kesempatan kerja akan tampak sebagai berikut :

Tabel 5.7 Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi
Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992
(Jiwa)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
1972	735331	90216	189262
1973	752568	100044	212672
1974	783438	107724	229797
1975	814911	123472	239746
1976	844201	131814	258197
1977	879719	157334	264307
1978	918294	170787	291326
1979	957509	193485	293966
1980	997243	216341	297163
1981	1037340	238019	312489
1982	1079898	259336	329593
1983	1094281	281682	377974
1984	1102714	305080	435593
1985	1125243	333234	478925
1986	1174281	361631	500296
1987	1213411	400404	526239
1988	1230593	429282	526239
1989	1271073	463089	629744
1990	1274034	499626	710806
1991	1283392	558007	769774
1992	1290391	600462	853492
LP	2,85%	9,45%	7,44%

Sumber : - Tabel 5.5
- Data diolah kembali

Tabel 5.8 Persentase Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992 (%)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
1972	72,46	8,89	18,65
1973	70,56	9,39	20,05
1974	69,89	9,61	20,85
1975	69,17	10,48	20,35
1976	68,40	10,68	20,92
1977	67,60	12,09	20,31
1978	67,14	12,36	20,05
1979	66,61	13,39	20,00
1980	66,01	14,32	19,67
1981	65,33	15,00	19,67
1982	64,71	15,54	19,75
1983	62,39	16,06	21,55
1984	59,82	16,55	23,63
1985	58,08	17,20	24,72
1986	57,67	17,76	24,57
1987	56,70	18,71	24,59
1988	54,81	19,12	26,07
1989	53,77	19,59	26,64
1990	51,28	20,11	28,61
1991	49,15	21,37	29,48
1992	47,02	21,88	31,10

Sumber : - Tabel 5.7
 - Data diolah kembali

Pertumbuhan rata-rata kesempatan kerja Sektor Primer adalah sebesar 2,85%, Sektor Sekunder 9,45%, dan sektor Tersier sebesar 7,44%. Dengan demikian tampak bahwa Sektor Sekunder merupakan sektor yang mempunyai tingkat pertumbuhan tertinggi, bila dibandingkan dengan Sektor Primer dengan Sektor Tersier.

Selain tingkat pertumbuhannya yang rendah, komposisi penyerapan tenaga kerja Sektor Primer juga terus mengalami penurunan selama periode 1972-1992.

Sektor Sekunder secara berangsur-angsur terjadi peningkatan komposisi dalam penyerapan tenaga kerja. Komposisi penyerapan tenaga kerja Sektor Sekunder pada tahun 1972 yaitu sebesar 8,89% dari total kesempatan kerja Propinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1983 meningkat menjadi 16,06%. Peningkatan ini terus berlanjut sampai pada tahun 1992 menjadi 21,88%.

Demikian pula halnya dengan Sektor Tersier, Tampak terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun selama periode yang diamati. Pada tahun 1972 dan 1983 masing-masing sebesar 18,65% dan 21,55%. Kemudian hingga mencapai 31,10% dari total kesempatan kerja pada tahun 1992 yaitu sebesar 2.774.345 jiwa.

5.3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Selatan

Produktivitas merupakan salah satu indikator dari pendapatan seseorang yaitu jika produktivitasnya meningkat pendapatannyapun diharapkan akan meningkat dan sebaliknya bila produktivitasnya rendah maka pendapatannyapun akan rendah.

Oleh karena itu produktivitas tenaga kerja dapat pula dijadikan ukuran keberhasilan suatu usaha atau pembangunan pada umumnya. Konsep produktivitas tenaga kerja dijabarkan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut.

Secara sektoral pada tabel berikut digambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja Propinsi Sulawesi Selatan selama periode 1972-1992.

Tabel 5.9 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha
Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992 (%)

Tahun	Pertanian	Pertambangan, Penggalian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air	Bangunan dan Konstruksi	Perdagangan, Restoran, Hotel	Angkutan dan Komunikasi	Lembaga Keu- angan dan Bank	Jasa - jasa, Pemerintahan
1972	0,440	0,263	0,506	0,421	0,906	1,532	3,049	3,325	0,706
1973	0,453	0,269	0,475	0,447	0,987	1,512	2,994	3,519	0,647
1974	0,497	0,271	0,551	0,492	0,940	1,560	3,147	2,663	0,708
1975	0,587	0,272	0,559	0,536	0,934	1,723	3,363	2,848	0,760
1976	0,584	0,270	0,580	0,544	0,921	1,776	3,672	3,051	0,707
1977	0,656	0,274	0,517	0,568	1,040	1,949	3,510	3,195	0,836
1978	0,696	0,325	0,507	0,617	0,043	1,910	3,484	3,532	0,837
1979	0,684	0,686	0,453	0,656	0,953	1,861	3,447	4,046	1,011
1980	0,691	0,800	0,500	0,732	1,104	1,745	3,765	4,938	1,186
1981	0,704	0,838	0,479	0,779	1,132	1,706	3,844	6,308	1,271
1982	0,693	0,886	0,476	0,905	1,286	1,607	3,533	7,735	1,366
1983	0,710	0,975	0,466	1,215	1,428	1,657	3,390	8,992	1,130
1984	0,743	0,969	0,400	1,334	1,341	1,526	3,064	8,605	0,994
1985	0,774	0,968	0,412	1,337	1,338	1,539	2,834	8,414	0,970
1986	0,800	0,940	0,469	1,290	1,318	1,482	2,688	7,785	1,005
1987	0,757	0,925	0,596	1,419	1,386	1,419	2,655	7,516	1,062
1988	0,835	0,904	0,632	1,483	1,389	1,337	2,534	7,365	1,030
1989	0,866	0,923	0,656	1,546	1,389	1,306	2,405	7,345	1,006
1990	0,930	0,965	0,715	1,581	1,367	1,276	2,320	7,033	0,892
1991	1,000	0,965	0,755	1,540	1,351	1,315	2,213	6,870	0,948
1992	1,051	1,116	0,773	1,497	1,343	1,337	2,160	6,801	0,885

Sumber : -- Tabel 5.1

-- Tabel 5.3

-- Data diolah kembali

Pada tabel 5.5 dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian selama periode 1972-1992 terus mengalami kenaikan yaitu dari 0,44% pada tahun 1972 naik hingga mencapai 1,05% pada tahun 1992. Hal yang sama juga terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, yaitu 0,26% pada tahun 1972 menjadi 1,12% pada tahun 1992.

Tiga sektor berikutnya yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air, serta sektor bangunan dan konstruksi juga mengalami peningkatan yaitu dari masing-masing 0,51%, 0,42%, dan 0,91% pada tahun 1972 menjadi masing-masing 0,77%, 1,50%, dan 1,34% pada tahun 1992.

Tingkat produktivitas tenaga kerja sektor perdagangan, restoran, dan hotel serta sektor jasa-jasa dan pemerintahan mengalami fluktuasi selama periode yang diamati, yaitu masing-masing sebesar 1,53% dan 0,71% pada tahun 1972, kemudian pada tahun 1982 masing-masing naik menjadi 1,61% dan 1,37%. Kemudian pada tahun 1992 masing-masing turun menjadi 1,34% dan 0,89%.

Sektor angkutan dan komunikasi dengan sektor lembaga keuangan dan bank dari tahun 1972 terus mengalami peningkatan hingga tahun 1983. Kemudian terus menurun sampai pada tahun 1992, yaitu 3,40% dan 8,99% menjadi 2,16% dan 6,80%.

Tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor ekonomi akan digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.10 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Menurut Sektor Ekonomi Propinsi Sulawesi
Selatan Periode 1972-1992 (%)

Tahun	Primer	Sekunder	Tersier
1972	0,440	0,989	1,082
1973	0,453	0,969	1,027
1974	0,497	1,045	1,084
1975	0,587	1,066	1,196
1976	0,584	1,159	1,189
1977	0,656	1,070	1,357
1978	0,696	1,076	1,357
1979	0,684	1,037	1,500
1980	0,691	1,157	1,601
1981	0,704	1,178	1,688
1982	0,693	1,168	1,739
1983	0,693	1,192	1,685
1984	0,710	1,128	1,522
1985	0,743	1,128	1,495
1986	0,744	1,079	1,495
1987	0,744	1,092	1,488
1988	0,800	1,173	1,479
1989	0,757	1,173	1,411
1990	0,835	1,188	1,411
1991	0,835	1,192	1,381
1992	0,866	1,192	1,337
	0,930	1,218	1,337
	1,000	1,210	1,337
	1,051	1,213	1,307

Sumber : - Tabel 5.3 dan tabel 5.7
- Data diolah kembali

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sektor Primer yang terdiri dari Sektor Pertanian mempunyai tingkat produktivitas tenaga kerja seperti terlihat pada tabel 5.10 di atas.

Dua sektor lainnya yaitu Sektor Sekunder yang terdiri dari Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan Air; Sektor Bangunan dan Konstruksi; serta Sektor Angkutan dan Komunikasi serta Sektor Tersier yang meliputi Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel; Sektor Lembaga Keuangan dan Bank; dan Sektor Jasa-jasa dan Pemerintahan mempunyai tingkat produktivitas tenaga kerja yang tidak terlalu berbeda. Pada tahun 1972 masing-masing sebesar 0,989% dan 1,082%, Kemudian pada tahun 1983 masing-masing naik menjadi 1,192% dan 1,685%. Selanjutnya pada tahun 1992 Sektor Sekunder meningkat lagi hingga mencapai 1,213% dan Sektor Tersier turun menjadi 1,307%.

5.4. Pengaruh Kesempatan Kerja dan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Periode 1972-1992

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan tercermin dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, hal ini akan dicapai melalui kenaikan produksi barang dan jasa yang tercakup dalam Produk Domestik Regional Brutonya. Dengan bertolak ukur dari Produk Domestik Regional Bruto tersebut maka kemajuan taraf

hidup dan tingkat kesejahteraan rakyat merupakan pencerminan dari hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami perkembangan bila tingkat ekonominya adalah lebih tinggi dari pada yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Guna mencapai hal tersebut maka dua faktor yang dianggap mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu penciptaan lapangan kerja secara produktif dan juga menyangkut peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh yang ditimbulkan oleh kesempatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Propinsi Sulawesi Selatan, dapat diamati dengan menggunakan pendekatan regresi, dimana kesempatan kerja dan tingkat produktivitas tenaga kerja sebagai variabel bebas dan Produk Domestik Regional Bruto sebagai variabel terikat.

Untuk lebih mendekati pada tujuan yang ingin dicapai maka kedua variabel bebas tadi masing-masing dibagi menjadi tiga sektor ekonomi yang meliputi Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier.

Setelah data yang digunakan diolah maka didapat persamaan regresi seperti terlihat pada persamaan di bawah ini, dan selanjutnya akan dijelaskan besarnya

pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

$$\ln Y = -,590 + ,201 \ln TK_1 + 1,086 \ln TK_2 + ,113 \ln TK_3 +$$

(1,518) (2,943) (0,806)

$$,035 \ln PT_1 + 2,945 \ln PT_2 + 1,530 \ln PT_3$$

(0,061) (1,570) (2,443)

Adj. $R^2=0,7724$ $R^2=0,8706$ $F=3,879$ $DW=2,4766$

Angka dalam kurung adalah nilai t-hitung.

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat kita lihat bahwa semua variabel bebas mempunyai hubungan positif terhadap variabel terikat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari masing-masing koefisien yang bertanda positif. Artinya jika masing-masing variabel yang berpengaruh tersebut meningkat maka pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan juga akan meningkat. Besarnya pengaruh tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel kesempatan kerja Sektor Primer adalah sebesar 0,201. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari variabel kesempatan kerja Sektor Primer maka diharapkan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan juga akan naik sebesar 0,201%, dalam kondisi variabel lain yang berpengaruh dianggap konstan.

Jika kesempatan kerja Sektor Sekunder naik sebesar satu persen, maka akan berpengaruh sebesar nilai

koefisien dari pada variabel kesempatan kerja Sektor Sekunder yaitu sebesar 1,086% terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun hubungan kedua variabel tersebut adalah signifikan pada tingkat signifikansi 5% dan dengan derajat kebebasan ($df=13$).

Nilai koefisien regresi dari variabel kesempatan kerja Sektor Tertier yang terdiri dari Sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel; Sektor Lembaga Keuangan dan Bank; serta Sektor Jasa-jasa dan Pemerintahan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dari variabel kesempatan kerja Sektor Tertier maka akan berpengaruh sebesar 0,113% terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan.

Apabila variabel produktivitas tenaga kerja Sektor Primer naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik sebesar nilai koefisien dari pada variabel tingkat produktivitas tenaga kerja Sektor Primer yaitu sebesar 0,035%, jika diasumsikan bahwa variabel lain yang berpengaruh dianggap konstan.

Sedangkan variabel tingkat produktivitas tenaga kerja Sektor Sekunder yang meliputi Sektor Pertambangan dan Penggalan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik, Gas, dan Air; Sektor Bangunan dan Konstruksi; serta Sektor Angkutan dan Komunikasi mempunyai pengaruh yang cukup besar seperti terlihat dari nilai koefisien

regresi variabel tingkat produktivitas tenaga kerja sektor Sekunder pada persamaan di atas yaitu sebesar 2,945% untuk kenaikan pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan selama periode yang diamati.

Variabel terakhir yang diamati adalah variabel tingkat produktivitas tenaga kerja Sektor Tertier atau tingkat produktivitas tenaga kerja Sektor tersier menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1,530. Nilai tersebut berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari variabel tingkat produktivitas tenaga kerja Sektor Tertier, maka akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,530%, jika dianggap bahwa variabel lain yang berpengaruh adalah konstan, dan hubungan kedua variabel tersebut adalah signifikan pada tingkat signifikansi dan dengan derajat kebebasan yang sama.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja pada ketiga sektor yang menunjukkan variasi tinggi dan rendahnya akan memberikan implikasi kebijakan pada pembangunan ketenagakerjaan khususnya dan perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.

Berdasarkan analisa prospek, potensi serta prioritas yang mendesak kesempatan kerja pada sektor yang nampak rendah akan semakin ditingkatkan. Dengan kata lain apabila masih prospek untuk diperluas, akan dikembangkan.

Demikian pula pada sektor yang memberikan kesempatan kerja lebih tinggi dan kurang efisien dan efektif akan dikurangi dan dialihkan ke sektor yang lain.

Derajat keeratan antara semua variabel bebas dengan variabel terikat ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,8706. Hal ini berarti bahwa 87% perubahan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh perubahan variabel bebas yang digunakan dalam model (lihat persamaan 5). Sedangkan 13% disebabkan oleh faktor lain.

Hasil pengujian secara keseluruhan atau uji-F menunjukkan nilai F-hitung (3,879) yang lebih besar dari pada nilai F-tabel (2,92) untuk tingkat signifikansi 5%, yang berarti bahwa antara variabel bebas secara keseluruhan dengan variabel terikat terdapat hubungan yang signifikan.

Pengujian dengan menggunakan uji-DW dari data yang diamati menunjukkan nilai DW-test sebesar 2,4766. Nilai ini berada pada daerah dimana terjadi otokorelasi.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Untuk melengkapi uraian penulisan skripsi ini, maka penulis akan menambah satu bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bab penutup. Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto periode 1972-1992 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,57% setiap tahun. Secara sektoral, sektor pertambangan dan penggalian mempunyai angka pertumbuhan yang tertinggi yaitu sebesar 15,72% per tahun, kemudian diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air serta sektor lembaga keuangan dan bank masing-masing sebesar 15,18% dan 13,64% per tahun. Dan setelah disederhanakan menjadi tiga sektor yang terdiri dari Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier maka terlihat pertumbuhannya adalah masing-masing 7,42%, 10,57%, dan 8,41% rata-rata setiap tahun.
2. Sementara itu pada periode yang sama laju pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja yaitu rata-rata 1,46% dan 2,77% setiap tahun, sedangkan angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja masing-masing sebesar 5,10% dan 1,30% per tahun. Menurut data yang ada penduduk yang sementara mencari pekerjaan pada tahun 1992 sebanyak 72.176 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,91% setiap tahun.

3. Dari sembilan lapangan usaha yang ada, dan setelah disederhanakan menjadi tiga sektor, ternyata Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling dominan peranannya dalam perkembangan perekonomian Propinsi Sulawesi Selatan. Dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan terhadap total pembentukan Produk Domestik Regional Bruto atau pendapatan daerah. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu hampir separuh dari tenaga kerja yang tersedia terserap atau bekerja di sektor tersebut.
4. Laju pertumbuhan kesempatan kerja Propinsi Sulawesi Selatan selama periode yang diamati yakni rata-rata 5,10% per tahun. Secara sektoral, sektor angkutan dan komunikasi mempunyai angka pertumbuhan tertinggi yaitu rata-rata 10,81% per tahun, kemudian sektor industri pengolahan serta sektor lembaga keuangan dan bank yaitu masing-masing sebesar 10,18% dan 9,65% setiap tahun. Setelah disederhanakan menjadi tiga sektor maka terlihat laju pertumbuhan kesempatan kerja Sektor Sekunder mempunyai angka pertumbuhan tertinggi yaitu



sebesar 9,45%, kemudian Sektor Tersier sebesar 7,44%, dan Sektor Primer adalah sebesar 2,85% rata-rata setiap tahun.

5. Hasil pengolahan dari data yang digunakan menunjukkan sektor lembaga keuangan dan bank mempunyai tingkat produktivitas tenaga kerja yang paling tinggi, kemudian sektor angkutan dan komunikasi, serta sektor perdagangan, restoran, dan hotel.
6. Dari hasil analisis regresi dari data yang diamati selama periode 1972-1992 terlihat bahwa diantara enam variabel bebas yang diteliti maka variabel tingkat produktivitas tenaga kerja Sektor Sekunder mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, kemudian variabel yang paling kecil pengaruhnya adalah variabel produktivitas tenaga kerja Sektor Primer yaitu hanya sebesar 0,035%. Dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa antara variabel bebas baik secara individu maupun secara keseluruhan dengan variabel terikat terdapat hubungan yang signifikan. Juga dapat diketahui bahwa andil atau sumbangan dari variabel bebas cukup besar terhadap variasi kenaikan variabel terikat, hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian dengan menggunakan uji statistik R^2 .

6.2. Saran-saran

Dari gambaran kenyataan perkembangan daerah Propinsi Sulawesi Selatan yang telah diuraikan pada bagian-bagian terdahulu, maka ada beberapa poin yang menjadi saran-saran dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Mengingat sektor pertanian masih mendominasi perekonomian daerah Propinsi Sulawesi Selatan dimana juga menunjukkan bahwa sektor inilah yang masih menyerap paling banyak tenaga kerja. Namun demikian banyak hal yang perlu diantisipasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah berkaitan dengan sektor utama ini. Misalnya kecendrungan harga yang tidak stabil, maka peranan pemerintah sangat diperlukan dalam pengambilan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Sehingga akibat yang fatal tidak terjadi, terutama yang akan menimpa para petani disebabkan karena rendahnya harga hasil-hasil pertanian. Selain itu pemerintah diharapkan dapat memberikan peluang-peluang kemungkinan para investor yang ingin menanamkan modalnya terutama yang bergerak di bidang industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, sehingga nilai tambah akan diterima oleh para petani cukup tinggi.
2. Komoditi perdagangan non-migas yang selama ini diekspor sangat prospek untuk untuk tetap dikembangkan, karena selain dimaksudkan untuk mendapatkan devisa untuk membangun negara umumnya dan

daerah Propinsi Sulawesi Selatan khususnya juga sangat dimungkinkan karena dampaknya terhadap perluasan kesempatan kerja sangat besar.

3. Tingkat kepadatan penduduk di Propinsi Sulawesi Selatan yang belum merata juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bakir, Zainab dan Chris Manning, Angkatan Kerja di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
2. Budiono, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1982.
3. International Labour Office, Penelitian Kerja dan Produktivitas, Seri Manajemen, No. 15a, Erlangga, Jakarta, 1975.
4. Jhingan, M. L, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1988.
5. Republik Indonesia, Ketetapan MPR No : II/MPR/1993, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
6. Sastraatmadji, Entang, Indikator-Indikator Perkonomanian, Armico, Bandung, 1986.
7. Simanjuntak, Payaman J, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE-UI, Jakarta, 1985.
8. Soeroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan Tenaga Kerja, LPFE-UGM, Yogyakarta, 1986.
9. Sukirno, Sadono, Ekonomi Pembangunan ; Proses, Masalah dan Kebijakan, LPFE-UI, Jakarta, 1985.
10. Sulistyarningsih, Endang dan Yudo Swasono, Metode Perencanaan Tenaga Kerja, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1983.
11. Supranto, J, Ekonometrika, Buku Satu, LPFE-UI, Jakarta 1983.
12. Tjiptoherijanto, Prijono, Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi, LPFE-UI, Jakarta, 1982.
13. Winardi, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua, Bandung, 1973.

Artikel-artikel, Laporan, dan Majalah :

14. Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kotamadya Propinsi Sulawesi Selatan, Kerjasama Biro Pusat Statistik dan Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan.
15. Majalah Demografi Indonesia, Nomor 30, Tahun ke XV, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Desember 1988.
16. Pendapatan Regional Propinsi Sulawesi Selatan 1979 - 1982, Biro Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan.